LAPORAN PENDAHULUAN

REVIEW MASTERPLAN PEMBANGUNAN KEBUNRAYA SUMATERA SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2012/2013



KATA PENGANTAR

Laporan Pendahuluan Review Pembangunan Masterplan Kebun Raya Sumatera Selatan ini disusun oleh Penyedia Jasa (Konsultan) sebagai tahap awal dalam rangkaian proses studi/kajian teknis tersebut. Laporan Pendahuluan ini disusun berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diterima; Diskusi Awal antara Tim Pelaksana dari Penyedia Jasa dengan Tim Teknis dari Pengguna Jasa; serta beberapa data dan informasi awal yang telah diinventarisasi oleh Konsultan.

Dalam Laporan Pendahuluan ini akan dijabarkan mengenai (1) pendahuluan yang merupakan gambaran umum pekerjaan; (2) Pemahaman mengenai segala kebijakan yang terkait dengan kegiatan ini (3) berbagai hal substansial yang merupakan pemahaman konsultan terhadap substansi pekerjaan, termasuk pemahaman dan tanggapan terhadap KAK, serta pendalaman substansial (hipotesa awal); (4) gambaran umum mengenai wilayah studi (5) pendekatan dan metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan; (6) berbagai hal yang bersifat teknis administratif, seperti rencana kerja, jadual pelaksanaan pekerjaan, penjabaran tenaga ahli dan personil, serta sistematika pelaporan serta (7) rencana survei yang akan dilaksanakan pada tahap selanjutnya.

Melalui Laporan Pendahuluan ini, diharapkan Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa dapat melakukan diskusi dan memperoleh kesepakatan bersama perkembangan pelaksanaan pekerjaan pada tahap awal ini, termasuk pemahaman terhadap substansi pekerjaan, efisiensi dan efektifitas pendekatan dan metodologi yang digunakan, komposisi tenaga ahli, serta kesiapan teknis lainnya. Dari diskusi dan kesepakatan yang diperoleh, selanjutnya diharapkan proses kajian substansial dapat dilaksanakan secara lebih terarah sesuai dengan sasaran yang diharapkan.

Akhirnya konsultan mengucapkan terima kasih atas segala saran, komentar dan masukan yang diberikan untuk penyempurnaan laporan ini. Besar harapan konsultan untuk dapat menghasilkan Review Pembangunan Masterplan Kebun Raya Sumatera Selatan yang terbaik.

PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR PETA	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
ABSTRAK	1
1.1. LATAR BELAKANG	2
1.2. MAKSUD & TUJUAN	3
1.2.1 Maksud	3
1.2.2 Tujuan	3
1.3. Sasaran	4
1.4. Keluaran	4
1.5. Lingkup Kegiatan	5
1.6. Batasan Lingkup Wilayah Kegiatan	6
BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN TERKAIT	1
ABSTRAK	1
2.1. UUD 45	2
2.2. MDGs	2
2.3. PERPRES RI NO 93 TAHUN 2011 TENTANG KEBUN RAYA	2
2.4. KEBIJAKAN TERKAIT LAINNYA	3
2.4.1. UU	3
2.4.2. PP	3
2.4.3. Peraturan Lainnya	4
BAB III PENDALAMAN SUBSTANSIAL	1
ABSTRAK	1
3.1. PENGERTIAN	2
3.1.1. Pengertian Terkait Judul	2

3.1.2. Pengertian Terkait Lainnya	2
3.1.3. Singkatan dan Akronim	6
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN	1
ABSTRAK	1
4.1. PROFIL KABUPATEN OGAN ILIR	2
4.1.1. Umum	2
4.1.2. Geografi	2
4.1.3. Administratif	5
4.1.4. Kondisi Fisik	8
4.1.5. Kependudukan	21
4.1.6. Perekonomian	30
4.2. STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG WILAYAH	46
BAB V METODOLOGI KERJA	1
ABSTRAK	1
5.1. METODOLOGI KERJA	2
5.2. METODOLOGI ANALISA	4
5.3. METODOLOGI SURVEI	4
BAB VI PROGRAM KERJA DAN PELAPORAN	1
ABSTRAK	1
6.1. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN	2
6.2. STRUKTUR ORGANISASI	2
6.3. TENAGA AHLI DAN TANGGUNG JAWABNYA	5
6.4. PELAPORAN	7
BAB VII PROGRAM SURVEI	1
ABSTRAK	1
7.1. PEMAHAMAN UMUM MENGENAI SURVEI	2
7.2. METODE SURVEI	2
7.2.1. Kegiatan Survei secara Sekunder	2
7.2.2. Kegiatan Survei Secara Primer	2
7.3. PERANGKAT SURVEI	2
7.3.1. Peralatan (Hardware) Survei	2
7.3.2. Checklist Data dan Informasi	3
7.3.3. Questionnaire untuk Wawancara	3

LAPORAN PENDAHULUAN

7.4. IDENTIFIKASI SASARAN DATA DAN INFORMASI	4
7.4.1. Data Sekunder	4
7.4.2. Data Primer	4
7.5. IDENTIFIKASI SASARAN INSTANSIONAL	5

DAFTAR TABEL

No table of figures entries found.	
No table of figures entries found.	
Tabel 6.1. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	2
Tabel 6.2. jumlah tenaga ahli	5
Tabel 7.1. Identifikasi Sasaran Data Sekunder	2

DAFTAR GAMBAR

No table of figures entries found.	
No table of figures entries found.	
No table of figures entries found.	
Gambar 5. 1. Metodologi Kerja	3
Gambar 5. 2. Metodologi Pelaksanaan Survei	4
Gambar 6. 2. Struktur Organisasi Pelaksanaan Pekeriaan	4

DAFTAR PETA

Peta 4.1. Orientasi Geografis Kabupaten Ogan Ilir	1
Peta 4.2. Wilayah Administratif Kabupaten Ogan Ilir	6
Peta 4.3. Kondisi Kelerengan Kab. Ogan Ilir	9
Peta 4.4. Kondisi Hidrologi Kab. Ogan Ilir	. 11
Peta 4.5. Tutupan Lahan Eksisting Kab. Ogan Ilir	. 12
Peta 4.6. Kondisi Eksisting Jaringan Jalan Kab. Ogan Ilir	. 13
Peta 4.7. Kondisi Eksisting Sistem Penyediaan Air Minum Kab. Ogan Ilir	. 15
Peta 4.8. Kondisi Eksisting Sistem Pengelolaan Persampahan Kab. Ogan Ilir	. 17
Peta 4.9. Kondisi Eksisting Jaringan Listrik Kab. Ogan Ilir	. 19
Peta 4.10. Kondisi Eksisting Sistem Telekomunikasi Kab. Ogan Ilir	. 17

BAB I PENDAHULUAN

<u>ABSTRAK</u>

PENDAHULUAN berisi arahan umum yang mendasari pelaksanaan kegiatan Review Pembangunan Masterplan Kebun Raya Sumatera Selatan. Bab pendahuluan terdiri dari penjabaran mengenai latar belakang; maksud; tujuan; sasaran; lingkup kegiatan; lokasi kegiatan; serta keluaran. Melalui bab ini akan diperoleh kesepakatan mengenai arah dan hasil studi sebagaimana diharapkan oleh Pengguna Jasa.

1.1. LATAR BELAKANG

Kebun Raya Indonesia adalah bagian dari kekayaan bangsa yang merupakan Pusat Pengetahuan Botani, Kawasan Konservasi, Kawasan Pendidikan dan Penelitian, dan sekaligus sebagai sarana rekreasi di alam terbuka.

Kenyataan bahwa keadaan tanah, iklim, komposisi vegetasi dan keanekaragaman tumbuhan suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya, maka setiap Kebun Raya di Indonesia juga mempunyai karakter dan potensi alam yang berbeda-beda pula, yang masing-masing mempunyai daya tarik tersendiri.

Kebun Raya berdasarkan Peraturan Presiden nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara ex-situ yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan.

Pembangunan Kebun Raya di Provinsi-Provinsi di Seluruh Indonesia di canangkan oleh Pemerintah sebagaimana dalam arahan Presiden RI pada peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional tanggal 11 Agustus 2004 di Puspitek Serpong, dan telah ditindaklanjuti dengan surat Menteri Riset dan Teknologi nomor 77/M/VIII/2004 tanggal 23 Agustus 2004 kepada seluruh Gubernur untuk merealisasikan pembangunan kebun raya yang dikoordinir oleh LIPI.

Selain Kebun Raya yang sudah dikenal luas yaitu Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi dan Kebun Raya Eka Karya Bedugul, sebagai sarana pendidikan dan penelitian, serta sebagai sarana rekreasi dengan potensi alam yang indah, dirasakan masih diperlukan kawasan lain yang belum tersentuh untuk dimanfaatkan secara optimal sebagai suatu Kebun Raya Indonesia. Berdasarkan prediksi atas dasar pembagian ecoregion, untuk mengkonservasi seluruh kekayaan jenis tumbuhan di Indonesia membutuhkan minimal 47 Kebun Raya yang tersebar secara proporsional di setiap ecoregion.

Sejalan dengan hal-hal tersebut, kehadiran kebun raya sangatlah penting karena selain fungsinya sebagai konservasi tanaman, penelitian, pengembangbiakan dan sebagai obyek wisata alam, dalam lingkup tugas dan sudut pandang Kementerian Pekerjaan Umum juga berfungsi sebagai konservasi sumber air dan daerah tangkapan air yang akan berguna sebagai cadangan air serta keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sebesar apapun upaya yang dilakukan Kementerian Pekerjaan

Umum dalam penyediaan air baku dan pengendalian banjir, kekeringan dan sebaliknya bencana banjir tetap mungkin terjadi apabila kita tidak memberikan perhatian akan keberadaan hutan dan RTH tersebut yang akan berfungsi sebagai daerah resapan air.

Keberadaan kebun raya di berbagai daerah di Indonesia walaupun baru sebagian kecil kebun raya yang berjalan dan sebagian lainnya hanya baru mencapai taraf perencanaan, kebun raya yang mengemban fungsi sebagai pusat pengetahuan botani, kawasan konservasi, pusat pendidikan dan penelitian, serta sarana rekreasi di alam terbuka, tak dapat dipungkiri akan menjadi salah satu solusi strategis bagi upaya penyelamatan tumbuhan Indonesia dari ancaman kepunahan akibat berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi sekaligus untuk menekan tingkatan emisi karbon, khususnya di Indonesia dan dunia pada umumnya.

Di sisi lain, keberadaan Kebun Raya akan menambah daya tarik daerah, yaitu sebagai pusat kegiatan ekonomi regional yang dapat meningkatkan potensi masyarakat setempat. Dengan demikian Kebun Raya bukan hanya menjadi prioritas/strategis daerah, akan tetapi menjadi milik seluruh masyarakat.

Salah satu upaya yang menjadi prioritas untuk pengembangan Kebun Raya selanjutnya adalah Kebun Raya Sumatera Selatan di Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk keperluan tersebut, sebagai langkah awal agar lebih memberikan arah yang jelas dalam pengembangan potensi Kebun Raya Sumatera Selatan perlu dibuat panduan berupa Master Plan sebagai starting point dalam menentukan langkah-langkah lebih lanjut.

1.2. MAKSUD & TUJUAN

1.2.1 Maksud

Maksud dari kegiatan Penyusunan/Review Master Plan ini adalah tercapainya panduan yang lebih konkrit, lebih detail dan lebih terukur dalam Pengembangan Kebun Raya Sumatera Selatan dalam kurun waktu 15-20 tahun mendatang.

1.2.2 Tujuan

Tujuan kegiatan Penyusunan/Review Master Plan ini adalah sebagai pedoman dalam pengembangan Kebun Raya Sumatera Selatan sehingga akan diperoleh guidelines dalam pembangunan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

1.3. Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan dari kegiatan ini, maka dalam pelaksanaanya harus dapat melalui beberapa sasaran sebagai berikut:

- 1. Tersosialisasikannya konsep Masterplan Kebun Raya Sumatera Selatan;
- Terwujudnya pemahaman yang baik oleh semua pemangku kepentingan kota/ kabupaten tentang Masterplan Kebun Raya Sumatera Selatan;
- 3. Terbangunnya koordinasi antar pemangku kepentingan kota dan propinsi.
- 4. tersusunnya sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan kota, sebagai acuan pelaksanaan pembangunan yang optimal sesuai sumberdaya dan sumberdana yang dimilikinya.
- 5. Adanya standarisasi teknis pelaksanaan penyebarluasan informasi penyusunan Masterplan Kebunraya Sumatera Selatan baik pada tingkat pusat maupun daerah.

1.4. Keluaran

Pembangunan kebun raya yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebun raya yaitu :

- a) Memiliki lokasi yang tidak dapat dialih-fungsikan
- b) Dapat diakses oleh masyarakat
- c) Memiliki koleksi tumbuhan yang terdokumentasi
- d) Koleksi tumbuhan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasinya

Rencana Induk (Master Plan) yang disusun dalam pembangunan suatu kebun raya, sedikitnya memuat:

- a. Kondisi eksisting
- b. Analisis tapak
- c. Analisis sosial dan budaya
- d. Zonasi kebun raya
- e. Rencana tapak dan rencana utilitas
- f. Pentahapan pembangunan
- g. Rencana pembiayaan

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan Kebun Raya tersebut harus mendapat pendampingan teknis dari LIPI, dalam hal ini Pusat Konservasi Tumbuhan - Kebun Raya Bogor.

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah tersusunnya Master Plan/Review Master Plan Pembangunan Kebun Raya Sumatera Selatan yang dapat memberikan informasi sebagai acuan dalam rangka pengembangan Kebun Raya di masa yang sekarang dan yang akan datang.

1.5. Lingkup Kegiatan

Rencana pembangunan Kebun Raya merupakan tanggapan nyata kita terhadap rekomendasi World Conference on Environmental Conservation and Preservation tahun 2000 di Rio de Janeiro, di mana dihimbau kepada semua negara di dunia untuk mengadakan inventarisasi semua spesies flora dan faunanya, serta memasukkannya dalam Agenda-21 Nasional masing-masing. Pembangunan Kebun Raya di Indonesia juga merupakan satu agenda nasional yang tercantum dalam Agenda 21 Indonesia dan sejalan dengan isi Artikel IX dari Convention on Biological Diversity (CBD) dan target VIII dari Global Strategy for Plant Conservation (GSPC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Pembangunan Kebun Raya adalah kegiatan mendirikan kebun raya yang diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan, baik merupakan pembangunan baru, lanjutan pembangunan kebun raya maupun pengembangan kebun raya yang sudah ada.

Dalam perencanaannya pembangunan Kebun Raya yang dilaksanakan melalui kegiatan:

- a) Studi kelayakan lokasi, setidak-tidaknya meliputi status lahan, kesesuaian lahan, penentuan lokasi yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, serta aksesibilitas lokasi.
- b) Inventarisasi dan analisis sumber daya yang ada.
- c) Inventarisasi kebutuhan infrastruktur pendukung.
- d) Penyusunan Rencana Induk (Master Plan).

1.6. Batasan Lingkup Wilayah Kegiatan

Batasan kegiatan Review Master Plan Pembangunan Kebun Raya Sumatera Selatan, dengan luas perencanaan sekitar 100 Ha.

BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN TERKAIT

<u>ABSTRAK</u>

TINJAUAN KEBIJAKAN merupakan penjabaran mengenai berbagai kebijakan dan referensi pustaka yang terkait dengan kegiatan studi yang dilakukan. Tinjauan kebijakan dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar substansi yang dihasilkan tidak bertentangan. Tinjauan pustaka dilakukan terhadap berbagai ferensi yang relevan sebagai masukan substansial, bench marking atau best practice yang memperkuat akan hasil studi.

2.1. UUD 45

Landasan fundamental dalam bidang Lingkungan Hidup adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang mengamanatkan bahwa:

> "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.."

Sesuai tata perundangan yang berlakukan di Indonesia, maka Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 H ayat (3) merupakan amanat tertinggi yang yang harus dijabarkan atau diterapkan melalui perundangan yang lain.

2.2. MDGs

Landasan fundamental yang berikutnya yang berkaitan dengan Kebun raya adalah *Millenium Development Goals (MDG's)* atau tujuan pembangunan *millennium* yaitu upaya untuk memenuhi hak-hak dasar kebutuhan manusia melalui komitmen bersama antara 189 negara anggota PBB untuk melaksanakan 8 (delapan) tujuan pembangunan yang antara lainnya berkaitan dengan kebun Raya yaitu:

"memastikan kelestarian lingkungan hidup; serta membangun kemitraan global dalam pembangunan."

Dengan kata lain menjelaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.3. PERPRES RI NO 93 TAHUN 2011 TENTANG KEBUN RAYA

Landasan fundamental yang berikutnya yang berkaitan dengan Kebun raya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 93 tahun 2011 tentang kebun Raya yang mengamanatkan bahwa:

"Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak"

Dengan kata lain, hak warga negara Indonesia atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak merupakan hak asasi yang harus dilindungi oleh Negara. Negara selaku pemangku kewajiban (*duty bearers*) mempunyai kewajiban untuk menghormati *(to*

respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfil) hak atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak tersebut.

2.4. KEBIJAKAN TERKAIT LAINNYA

2.4.1. UU

Berbagai Undang-Undang (UU) yang menjadi pertimbangan dalam substansi Pembangunan Kebun Raya dan Infrastruktur sarana dan prasarana antara lain:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Pokok Agraria;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
- 5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang **Pemerintah Daerah**;
- 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang **Pengelolaan Sampah**;
- 8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang **Perlindungan dan** Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.4.2. PP

Berbagai Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi pertimbangan dalam substansi Pembangunan Kebun Raya dan Infrastruktur, sarana dan prasarana antara lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penatagunaan Tanah;

- 4. Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2004 tentang Peraturan Pelaksananaan UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang **Pembagian Urusan**Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang **Rencana Tata Ruang** Wilayah Nasional;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang **Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar**;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang **Penyelenggaraan Penataan Ruang.**

2.4.3. Peraturan Lainnya

Berbagai Peraturan Menteri (PERMEN), Keputusan Menteri (KEPMEN), Standar Nasional Indonesia (SNI) serta Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) lainnya yang menjadi pertimbangan dalam substansi aspek sosial budaya dalam pengembangan perumahan dan permukiman perkotaan berbasis kearifan dan sumber daya lokal antara lain:

- Keputusan Menteri Kehutanan RI No: SK.485/Menhut-II/2012 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan tujuan Khusus Untuk Hutan Penelitian Dan Pengembangan Serta Pendidikan Lingkungan Dalam Bentuk Kebun Raya Sumatera Selatan Pada Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Di Konversi di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan seluas ± 100 (seratus) Ha.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M2007 tentang Pedoman
 Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman
 Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;

- 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 tahun 2009 tentang **Pedoman**Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 5. SNI 03-2853-1995, SNI 03-2446-1991, SNI 03.6967-2003 terkait **Jalan**;
- 6. SNI 06-2409-2002 dan SNI 03-2453-2002 terkait drainase;
- 7. AB-K/RE-RT/TC/026/98 dan ABK/OP/ST/004/98 terkait Air Minum;
- 8. SNI 03-2398-2002, PTT-19-2000-C dan PTS-09-2000-C terkait Sanitasi;
- 9. SNI 19-3964-1994 dan SNI 03-3242-1994 dan SNI 19-3983-1995 terkait Persampahan;
- 10. SNI dan NSPK terkait lainnya.

BAB III PENDALAMAN SUBSTANSIAL

ABSTRAK

PENDALAMAN SUBSTANSIAL merupakan elaborasi substansial pada tahap awal sebagai bentuk hipotesa awal berdasarkan data dan informasi yang diperoleh. Pendalaman substansial akan mengelaborasi berbagai hal terkait dengan pengembangan perumahan dan permukiman di Indonesia, aspek sosial budaya, serta kearifan dan sumber daya lokal dalam skala nasional. Hipotesa awal ini menjadi dasar substansial untuk diuji dan dielaborasi lebih lanjut.

3.1. PENGERTIAN

3.1.1. Pengertian Terkait Judul

Beberapa pengertian terminologi yang berikaitan dengan judul kegiatan Penyusunan **Review Masterplan Kebun Raya Sumatera selatan** dapat dijelaskan secara definitif sebagai berikut:

1. Review

Definisi dari berbagai sumber yang menjelaskan arti Refview menuruit wikipedia.org menyebutkan bahwa review adalah menevaluasi dari suatu publikasi atau produk.

2. Masterplan

Definisi dari berbagai sumber yang menjelaskan arti Masterplan menurut Kamus Besar bahasa indonesia adalah rencana induk atau rencana secara meyelutuh

3. Kebun raya

Menurut kamus besar bahasa indonesia Kebun Raya adalah kebun yang sangat luas tempat memelihara berbagai tumbuhan, baik untuk penelitian maupun sebagai tempat rekreasi.

Menurut Peraturan Presiden tentang Kebun Raya Tahun 2011, Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara ex situ yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan.

3.1.2. Pengertian Terkait Lainnya

Pengertian berbagai istilah yang berkaitan dengan substansi Penyusunan Review Pembangunan Masterplan Kebun Raya Sumatera Selatan yang mengacu pada berbagai peraturan perundangan dan literatur yang ada dapat dijelaskan sebagai berikut.

 Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat merurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- **Detail Enginering Design** adalah perencanaan pekerjaan secara rinci yang memuat ketentuan umum dan spesifikasi konstruksi termasuk gambar dan biaya.
- **Drainase** adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air atau ke bangunan resapan buatan.
- Drainase Kawasan adalah prasarana drainase, berupa saluran atau sungai atau saluran buatan yang berada di dalam kawasan perumahan yang berfungsi mengendalikan kelebihan air permukaan kebadan air dan atau ke bangunan resapan buatan sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberi manfaat bagi kehidupan manusia.
- Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- Jalan Lingkungan adalah prasarana transportasi yang menghubungkan antar persil di kawasan perumahan, berada pada permukaan tanah dan dapat melayani lalu-lintas roda 4 (empat) ringan dengan kecepatan rendah serta mempunyai lebar perkerasan jalan antara 3 5 meter.
- Jalan Lokal Primer adalah jalan umum yang berfungsi menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
- Jalan Lokal Primer Kawasan adalah jalan lokal primer pada kawasan permukiman.
- Jalan Lokal Sekunder adalah jalan umum yang berfungsi menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke perumahan.
- Jalan Lokal Sekunder Kawasan adalah jalan lokal sekunder pada kawasan permukiman.
- Jaringan primer prasarana kawasan adalah jaringan utama yang menhubungkan antara satuan perumahan dalam kawasan perumahan atau antara perumahan

- dengan kawasan laindan digunakan untuk kepentingan umum, baik berupa prasarana jalan darat maupun jalan air.
- Jaringan sekunder prasarana kawasan adalah jaringan cabang dari jaringan primer prasarana kawasan perumahan yang melayani kebutuhan di dalam 1 (satu) satuan perumahan yang digunakan untuk kepentingan umum.
- Jaringan tersier prasarana kawasan adalah adalah jaringan cabang dari jaringan sekunder prasarana kawasan perumahan yang melayani kebutuhan ke masingmasing rumah yang digunakan untuk kepentingan umum.
- Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang untuk menyelenggarakan kegiatan dengan fungsi khusus seperti industri, perbatasan, nelayan, pertambangan, pertanian, pariwisata, pelabuhan, cagar budaya dan rawan bencana.
- Kawasan Perbatasan adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang berbatasan dengan negara lain, baik terletak di perbatasan darat maupun perbatasan laut.
- Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja pada kawasan khusus atau bekerja untuk melayani kebutuhan terkait dengan kehidupan dan penghidupan di kawasan khusus dan/atau sekitarnya dan dapat bertempat tinggal di perumahan kawasan khusus.
- Pelaku Pembangunan adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang melaksanakan pembangunan rusunami.
- Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota beserta perangkat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
- Pemerintah daerah provinsi adalah gubernur beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif daerah provinsi.
- Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

- Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah kelengkapan dasar dan fasilitas yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara optimal;
- Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan adalah rencana rinci tata ruang kawasan di wilayah Kabupaten/Kota.
- Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perumahan Rakyat (KEMENPERA)
 tahun 2010-2014 adalah dokumen perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
 untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan 2014;
- Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah rencana teknik ruang kawasan yang digunakan untuk pengendalian pemanfatan ruang suatu lingkungan/kawasan, menindaklanjuti rencana detail tata ruang dan sebagai panduan dalam rangka perwujudan kualitas bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan dari aspek fungsional, sosial, ekonomi dan lingkungan bangunan termasuk ekologi dan kualitas.
- Rencana Tata Ruang (RTR) adalah hasil perencanaan tata ruang.
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah sebidang tanah yang hanya diperuntukan sebagai ruang terbatas untuk fisik bangunan, menunjang bangunan lainnya, juga dapat berfungsi sebagai penyeimbang sirkulasi udara, penetrasi udara, dan pembatas antar kawasan fungsional atau wilayah administrasi tertentu.
- Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya dan politik masyarakat.
- Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan lahan dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.
- Tanah Bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin bangunan.
- Tata Ruang adalah wujud struktural dan pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
- **Utilitas** adalah sarana penunjang untuk pelayanan perumahan yang meliputi sarana air minum, listrik, telepon dan gas.

• **Utilitas umum** adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. Utilitas umum meliputi jaringan listrik, jaringan transportasi, jaringan telepon dan pemadam kebakaran.

3.1.3. Singkatan dan Akronim

Beberapa singkatan yang digunakan dan terkait dengan substansi kajian dapat dijelaskan secara definitif sebagai berikut:

- 3R adalah singkatan dari Reduce, Reuse, Recycle,
- BANTEK adalah singkatan dari Bantuan Teknis,
- BKPRD adalah singkatan dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah,
- BKPRN adalah singkatan dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional,
- IKU adalah singkatan dari Indikator Kinerja Utama,
- IPTEK adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
- JAKSTRA adalah singkatan dari Kebijakan dan Strategi,
- **KEPMEN** adalah singkatan dari Keputusan Menteri,
- KEPRES adalah singkatan dari Keputusan Presiden,
- KN adalah singkatan dari Keuangan Negara,
- KSN adalah singkatan dari Kawasan Strategis Nasional,
- KSP adalah singkatan dari Kawasan Strategis Provinsi,
- MDGs adalah singkatan dari Millenium Development Goals,
- NSPK adalah singkatan dari Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria,
- PEMDA adalah singkatan dari Pemerintah Daerah,
- PEMKAB adalah singkatan dari Pemerintah Kabupaten,
- PEMKOT adalah singkatan dari Pemerintah Kota,
- PEMPROV adalah singkatan dari Pemerintah Provinsi,
- PERBUP adalah singkatan dari Peraturan Bupati,
- PERDA adalah singkatan dari Peraturan Daerah,
- PERGUB adalah singkatan dari Peraturan Gubernur,
- PERPRES adalah singkatan dari Peraturan Presiden,
- PERMEN adalah singkatan dari Peraturan Menteri,
- PERWAL adalah singkatan dari Peraturan Walikota,
- PJU adalah singkatan dari Penerangan Jalan Umum,
- PKL adalah singkatan dari Pusat Kegiatan Lokal,
- PKN adalah singkatan dari Pusat Kegiatan Nasional,

- PKW adalah singkatan dari Pusat Kegiatan Wilayah,
- PU adalah singkatan dari Pekerjaan Umum,
- RDTR adalah singkatan dari Rencana Detail Tata Ruang,
- RENSTRA adalah singkatan dari Rencana Strategis,
- RPJPN adalah singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional,
- RPJMN adalah singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,
- RPJPD adalah singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
- RPJMD adalah singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
- RPKPP adalah singkatan dari Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas,
- RTBL adalah singkatan dari Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan,
- RTH adalah singkatan dari Ruang Terbuka Hijau,
- RTNH adalah singkatan dari Ruang Terbuka Non Hijau,
- RTR adalah singkatan dari Rencana Tata Ruang,
- RTRW-N adalah singkatan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
- RTRW-P adalah singkatan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,
- RTRW-K adalah singkatan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota,
- SDA adalah singkatan dari Sumber Daya Alam,
- SDM adalah singkatan dari Sumber Daya Manusia,
- SNI adalah singkatan dari Standar Nasional Indonesia,
- SPK adalah singkatan dari Strategi Pengembangan Kota,
- SPPN adalah singkatan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
- TPA adalah singkatan dari Tempat Pengolahan Akhir,
- TPS adalah singkatan dari Tempat Pemilahan Sementara,
- TUPOKSI adalah singkatan dari Tugas Pokok dan Fungsi.

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN

ABSTRAK

GAMBARAN UMUM WILAYAH KAJIAN merupakan elaborasi awal yang didasarkan pada data sekunder terhadap lokasi-lokasi yang dipilih menjadi wllayah kajian sesuai KAK Elaborasi awal ini diharapkan mampu memberikan gambaran umum terkait dengan substansi kajian yang akan ditindaklanjuti dengan kegiatan survey.

4.1. PROFIL KABUPATEN OGAN ILIR

4.1.1. Umum

Kabupaten Ogan Ilir adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Ogan Ilir berada di jalur lintas timur Sumatera dan pusat pemerintahannya terletak sekitar 35 km dari Kota Palembang.

Nama OGAN ILIR sebagai identifikasi bagi suatu kesatuan wilayah dipergunakan sejak masa sebelum kemerdekaan. Paling tidak, pada abad ke-19 pada masa kolonial Belanda, identifikasi ini telah ditetapkan dalam pengertian teritorial dan administratif. Dalam Regeering Almanak yang diterbitkan Belanda pada tahun 1870

Di kabupaten ini berlokasi kampus Universitas Sriwijaya. Selain itu terdapat pula Pondok Pesantren Al Ittifaqiah yang didirikan pada tanggal 10 Juli 1967 serta Pondok Pesantren Raudhatul Ulum yang terletak di Desa Sakatiga serta Pondok Pesantren Nurul Islam (PPNI) yang berlokasi di Desa Seri Bandung, Kec. Tanjung Batu. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani.

4.1.2. Geografi

Secara geografis Kabupaten Ogan Ilir (OI) terletak diantara 2° 55' - 3° 15' Lintang Selatan dan diantara 104° 20' - 104° 48' Bujur Timur yang dilengkapi dengan pengaruh interaksi kawasan amatan dengan wilayah sekitar terutama dalam Provinsi Sumatera Selatan

Secara administratif wilayah Kabupaten Ogan Ilir memiliki 16 (enam belas) kecamatan, dengan luas wilayah mencapai 266.607 Ha dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

Selanjutnya wilayah Kabupaten Ogan Ilir mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Gandus, Kecamatan Kertapati, dan Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang serta Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Jejawi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kecamatan Pedamaran, dan Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir; serta Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Lubai, Kecamatan Gelumbang, dan Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim.

Jika dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Ogan Ilir memiliki nilai strategis dan berada dekat Kota Palembang yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan.

Kedekatan ini merupakan salah satu keunggulan komparatif yang dimiliki Kabupaten Ogan Ilir. Untuk lebih jelasnya mengenai letak geografis Kabupaten Ogan Ilir dapat dilihat pada Tabel I.3 dan Gambar 1.1 dan Gambar 1.2

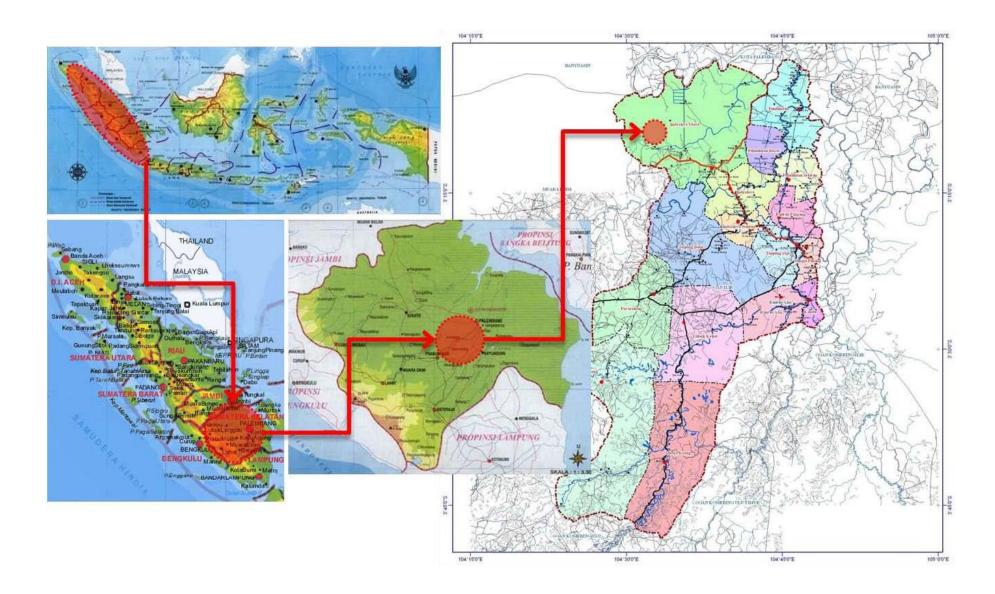
Tabel I.3

Luas Wilayah Administrasi Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan

Di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah	Jumlah
NO	Recalliatali	Km ²	Hektar	Desa	Kelurahan
1.	Indralaya	71,08	7.108	17	3
2.	Indralaya Utara	502,47	50.247	15	1
3.	Indralaya Selatan	95,76	9.576	14	-
4.	Pemulutan	122,92	12.292	25	-
5.	Pemulutan Barat	60,00	6.000	11	-
6.	Pemulutan Selatan	61,49	6.149	15	-
7.	Tanjung Batu	263,75	26.375	19	2
8.	Payaraman	180,57	18.057	11	2
9.	Tanjung Raja	70,41	7.041	15	4
10.	Sungai Pinang	42,62	4.262	12	1
11.	Rantau Panjang	40,85	4.085	12	-
12.	Muara Kuang	300,75	30.075	13	1
13.	Rambang Kuang	528,82	52.882	13	-
14.	Lubuk Keliat	212,17	21.217	10	-
15.	Rantau Alai	62,16	6.216	13	-
16.	Kandis	50,25	5.025	12	-
	Total	2.666,07	266.607	227	14

Peta 4.1. Orientasi Geografis Kabupaten Ogan Ilir



4.1.3. Administratif

Secara administratif wilayah Kabupaten Ogan Ilir memiliki 16 (enam belas) kecamatan, dengan luas wilayah mencapai 266.607 Ha dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel I.3.

Tabel I.3

Luas Wilayah Administrasi Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan

Di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah	Jumlah
NO	Recalliatali	Km ²	Hektar	Desa	Kelurahan
1.	Indralaya	71,08	7.108	17	3
2.	Indralaya Utara	502,47	50.247	15	1
3.	Indralaya Selatan	95,76	9.576	14	-
4.	Pemulutan	122,92	12.292	25	-
5.	Pemulutan Barat	60,00	6.000	11	-
6.	Pemulutan Selatan	61,49	6.149	15	-
7.	Tanjung Batu	263,75	26.375	19	2
8.	Payaraman	180,57	18.057	11	2
9.	Tanjung Raja	70,41	7.041	15	4
10.	Sungai Pinang	42,62	4.262	12	1
11.	Rantau Panjang	40,85	4.085	12	-
12.	Muara Kuang	300,75	30.075	13	1
13.	Rambang Kuang	528,82	52.882	13	-
14.	Lubuk Keliat	212,17	21.217	10	-
15.	Rantau Alai	62,16	6.216	13	-
16.	Kandis	50,25	5.025	12	-
T	otal Kab. Ogan Ilir	2.666,07	266.607	227	14

Sumber: Laporan LKPJ Kab. Ogan Ilir tahun 2009

PEMERINTAHAN KABUPATEN OGAN ILIR KOTA PALEMBANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN OGAN ILIR **ADMINISTRASI** KABUPATEN OGAN ILIR KABUPATEN MUARA ENIM DIAGRAM LOKASI KETERANGAN KOTA Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan BATAS ADMINISTRASI Batas Provinsi Batas Kabupaten Batas Kecamatan Sungai Sungai JARINGAN TRANSPORTASI

H—H— Jalur Kereta Api

Jalan Arteri Primer

Jalan Kolektor Primer 2 Jalan Lokal Primer Jalan Lingkungan WILAYAH ADMINISTRASI Kec. Indralaya Kec. Indralaya Selatan Kec. Indralaya Utara Kec. Kandis Kec. Lubuk Keliat Kec. Payaraman Kec. Pemulutan Kec. Pemulutan Barat Kec. Pemulutan Selatan KABUPATEN OGAN KOMERING ULU Kec. Rambang Kuang Kec. Rantau Alai Kec. Rantau Panjang Kec. Sungai Pinang Kec. Tanjung Batu Kec. Tanjung Raja

Peta 4.2. Wilayah Administratif Kabupaten Ogan Ilir

4.1.4. Kondisi Fisik

Kabupaten Ogan Ilir (OI) merupakan kabupaten baru yang dibentuk berdasarkan pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir dan beribu kota di Indralaya. Kondisi fisik dasar wilayah terdiri dari jenis dan komposisi tanah, klimatologi, hidrologi, dan hidrogeologi yang dijabarkan sebagai berikut:

4.1.4.1 Geologi

Kabupaten Ogan Ilir adalah suatu wilayah yang umumnya datar dan didominasi oleh rawa mengingat 65 % dari luas wilayah kabupaten yang terdiri atas rawa lebak dan rawa pasang surut.

Geologi Regional Kabupaten Ogan Ilir secara tatanan stratigrafi termasuk dalam sub cekungan Palembang, dan merupakan bagian dari cekungan Sumatera Selatan yang terbentuk pada zaman tersier, hingga diakhiri dengan endapan holosen.

Stratigrafi Regional Kabupaten Ogan Ilir dari tua ke muda terdiri atas endapan gunung api, endapan sedimen dan endapan permukaan antara lain Formasi Muara Enim (TMPM), Formasi Kasai (QTK) dan endapan permukaan (Qs dan Qa).

Morfologi Kabupaten Ogan Ilir Berdasarkan pengamatan topografi dan litologi penyusunnya dapat dibagi menjadi 2 satuan morfologi yaitu, Morfologi Bergelombang dan Morfologi Dataran.

Ditinjau dari aspek geologi, Kabupaten Ogan Ilir terdiri atas lima formasi geologi, yaitu formasi alluvial, formasi Palembang anggota bawah, formasi Palembang anggota tengah, formasi palembang anggota atas dan formasi bahan gunung api muda Tugu Mulyo.

Struktur geologi yang kompleks seperti patahan, lipatan dan ketidak-stabilan tanah, tidak ditemui di kabupaten ini. Dalam hubungan ini dapat dinyatakan bahwa seluruh wilayah OI aman dari kemungkinan bahaya longsor atau gangguan aktifitas geologis terutama gempa bumi.

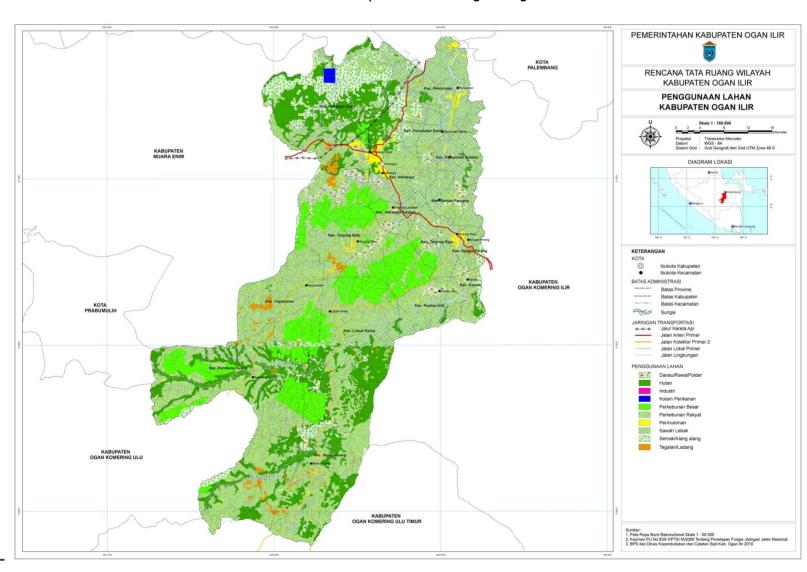
Kendala utama bagi wilayah OI, berupa resiko erosi-sedimentasi yang menimbulkan pendangkalan pada hampir seluruh sungai utama, akibat kemerosotan pengelolaan DAS. Untuk menekan laju pengendapan oleh erosi, setiap kegiatan pembangunan di daerah aliran sungai perlu melalui pendekatan konservasi tanah dan air.

PEMERINTAHAN KABUPATEN OGAN ILIR RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN OGAN ILIR **KEMIRINGAN LAHAN** KABUPATEN OGAN ILIR oyeksi : Transverse Mercator turn : WGS - 84 item Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48 S KABUPATEN MUARA ENIM DIAGRAM LOKASI KETERANGAN 0 Ibukota Kecamatan KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR BATAS ADMINISTRASI Batas Provinsi Batas Kabupaten KOTA PRABUMULIH Batas Kecamatan Sungai Sungai JARINGAN TRANSPORTASI

H H J Jalur Kereta Api

Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer 2 Jalan Lokal Primer Jalan Lingkungan 0 - 2 % 2 - 4 % KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR Sunther: 1. Peta Ruga Bumi Bakotsurfanal Skala 1: 50.000
2. Peta RePPProt.
3. Repreme VI. No.530 (RPTS/M/2009 Tentang Penetapan Fungsi Jaringan Jalan Nasional.
4. Draft RTRWP Sumatera Solatan 2010 - 2020
5. Hall Renoran.

Peta 4.3. Kondisi Kelerengan Kab. Ogan Ilir



Peta 4.4. Tutupan Lahan Eksisting Kab. Ogan Ilir

PEMERINTAHAN KABUPATEN OGAN ILIR KOTA PALEMBANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN OGAN ILIR RENCANA SISTEM AIR BERSIH KABUPATEN OGAN ILIR KABUPATEN MUARA ENIM DIAGRAM LOKASI KETERANGAN KOTA Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR BATAS ADMINISTRASI Batas Provinsi Batas Kabupaten Batas Kecamatan Sungai Sungai JARINGAN TRANSPORTASI

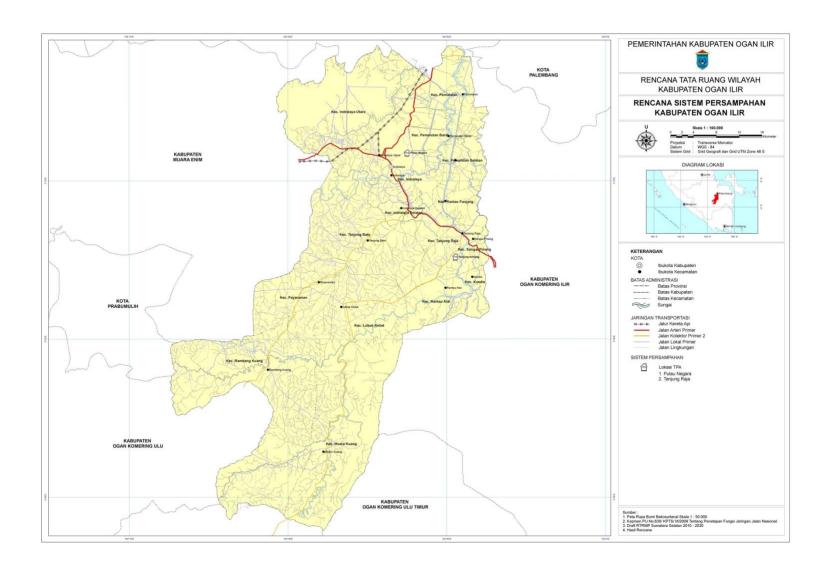
H—H—H Jalur Kereta Api

Jalan Arten Primer

Jalan Kolektor Primer 2 Jalan Lokal Primer Jalan Lingkungan SISTEM AIR BERSIH Sumber Air Baku

Peta 4.5. Kondisi Eksisting Sistem Penyediaan Air Minum Kab. Ogan Ilir

Peta 4.6. Kondisi Eksisting Sistem Pengelolaan Persampahan Kab. Ogan Ilir



PEMERINTAHAN KABUPATEN OGAN ILIR KOTA PALEMBANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN OGAN ILIR RENCANA SISTEM PRASARANA ENERGI KABUPATEN OGAN ILIR Proyeksi : Transverse Mercator
Datum : WGS - 84
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48 S KABUPATEN MUARA ENIM DIAGRAM LOKASI KETERANGAN KOTA Ibukota Kecamatan KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR BATAS ADMINISTRASI Batas Provinsi Batas Kabupaten KOTA PRABUMULIH Batas Kecamatan Sungai JARINGAN TRANSPORTASI Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer 2
Jalan Lokal Primer
Jalan Lingkungan JARINGAN ENERGI # PLTGU Jaringan Listrik Jaringan Gas KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Peta 4.7. Kondisi Eksisting Jaringan Listrik Kab. Ogan Ilir

4.1.5. Kependudukan

Pada tahun 2010 tercatat jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 422.712 jiwa, dengan komposisi penduduk terdiri dari 209.094 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan, sementara penduduk dengan jenis kelamin laki-laki adalah sebesar 209.094 jiwa.

Tabel I.8 Jumlah Penduduk Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006-2010

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)						
RECAMATAN	2006	2007	2008	2009	2010		
Muara Kuang	18.157	20.016	20.316	20.820	21.078		
Tanjung Batu	41.105	42.616	44.285	44.856	45.593		
Tanjung Raja	38.893	39.066	39.421	42.210	42.920		
Indralaya	41.192	41.785	43.591	44.301	44.585		
Pemulutan	37.508	40.154	40.774	41.589	42.318		
Rantau Alai	12.538	15.282	15.798	16.295	16.511		
Indralaya Utara	20.109	20.511	21.495	22.206	22.472		
Indralaya Selatan	21.078	21.316	22.454	23.979	24.309		
Pemulutan Selatan	15.890	18.238	18.581	21.362	21.576		
Pemulutan Barat	12.943	13.684	13.971	14.152	14.403		
Rantau Panjang	17.996	22.059	22.640	23.138	23.527		
Sungai Pinang	24.042	23.631	24.287	26.393	26.711		
Kandis	10.833	11.948	11.966	11.993	12.181		
Rambang Kuang	16.693	18.387	19.022	20.649	21.046		
Lubuk Keliat	16.784	17.781	18.598	18.663	18.875		
Payaraman	19.572	22.846	23.520	24.197	24.607		
Jumlah	365.333	389.320	400.719	416.803	422.712		

Sumber: Bappeda Tahun 2010

Tabel I.9

Kepadatan Penduduk & Range Kepadatan Penduduk

Di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 dan 2009

No.	Nama Kecamatan	2008 Kepadatan / Km2	2009 Kepadatan / Km2				
Kepada	Kepadatan 0 - 100 jiwa / Km2						
1.	Indralaya Utara	45	47				
2.	Rambang Kuang	35	39				
3.	Muara Kuang	66	69				

No.	Nama Kecamatan	2008 Kepadatan / Km2	2009 Kepadatan / Km2
4.	Lubuk Keliat	89	90
Kepada	tan 100 - 200 jiwa / Km2		
5.	Payaraman	130	134
6.	Tanjung Batu	167	170
Kepada	tan 200 - 300 jiwa / Km2		
7.	Rantau Alai	252	262
8.	Indralaya Selatan	223	239
9.	Kandis	240	238
10.	Pemulutan Barat	232	236
Kepada	tan 300 - 400 jiwa / Km2		
11.	Pemulutan Selatan	302	347
12.	Pemulutan	331	338
Kepada	tan > 400 jiwa / Km2		
13.	Rantau Panjang	554	566
14.	Indralaya	430	438
15.	Tanjung Raja	559	559
16.	Sungai Pinang	569	619
Kepada	tan Penduduk Total	150	156

Sumber: Hasil Analisis

B. Komposisi / Struktur Penduduk Menurut Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Prosentase menurut jenis pekerjaan penduduk di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2009 menunjukkan bahwa Jenis Pekerjaan terbanyak adalah sebagai petani dan buruh tani yang mencapai 165.262 orang atau 61 %, kemudian diikuti Pedagang dan Transportasi sebesar 54.184 orang atau 20 persen serta Bekerja di industri kecil menengah besar dan konstruksi mencapai 37.929 orang atau 14 %, dan terkecil adalah bergerak pada jasa, PNS, TNI, Polri yang hanya mencapai 13.547 orang atau sebanyak 5 % dari jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan utama dan tetap sebanyak 270.922 jiwa .

Tabel 1.10

Komposisi Jumlah Penduduk menurut Jenis Pekerjaan
di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009

No	lonis Pokoriaan	2009			
No	Jenis Pekerjaan	Jiwa	%		
1	Petani dan Buruh Tani	165.262	61		
2	Dagang dan Transportasi	54.184	20		
3	Industri dan konstruksi	37.929	14		
4	Jasa, PNS, TNI, Polri, dll.	13.547	5		
	Jumlah Pekerja	270.922	100		

Sumber: Bappeda Tahun 2009

Komposisi Jumlah Penduduk usia 10 tahun keatas menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2005-2009 menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran komposisi dari golongan tertinggi Tidak Tamat SD dari 41,94 % tahun 2005 secara bertahap telah mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi 20,77 % dan peningkatan komposisi terjadi pada golongan Tamat SD dari 35,85 % menjadi 38,66 % sebagai golongan tertinggi. Peningkatan juga terjadi pada golongan Tamat SLTP dari 11,65 % menjadi 20,58 %, Golongan Tamat SLTA dari 9,27 % menjadi 17,64 %. seperti tampak pada Tabel I.11

Ketersediaan tenaga kerja penduduk Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2009 terdiri dari jumlah Angka Angkatan Kerja yang mencapai 213.572 orang yang terdiri dari Bekerja sebanyak 204.860 orang dan tahap mencari pekerjaan sebanyak 8.712 orang, sedangkan jumlah Bukan Angkatan Kerja di Kabupaten Ogan Ilir mencapai 110.908 orang. Untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2009 mencapai 66,41 % dengan Angka Pengangguran sebanyak 4,08 % atau 8.712 orang. Keadaaan tingkat pengangguran penduduk Kabupaten Ogan Ilir tahun 2009 seperti pada gambar grafik berikut.

Tabel I.11 Komposisi Jumlah Penduduk Umur 10 tahun keatas menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009

No	Tingkat Pendidikan	Tahun 2009		
110	r ingrae r charaman	Jumlah	%	
1	Tidak / Belum Tamat SD	76.334	20,27	
2	Tamat SD sederajat	145.589	38,66	
3	Tamat SLTP sederajat	75.502	20,58	
4	Tamat SLTA sederajat	66.430	17,64	
5	Tamat Perguruan Tinggi	10.732	2,85	
	Jumlah	376.590	100	

Sumber: Bappeda Kab. Ogan Ilir tahun 2009

Tabel I.12

Komposisi Penduduk Usia Kerja, Tenaga Kerja dan Angka Pengangguran di

Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009

Uraian	Tahun 2009
Penduduk Usia Kerja (org)	324.480
Angkatan kerja (org)	213.572
Bukan Angkatan kerja (org)	110.908
Tenaga Kerja yang Bekerja (org)	204.860
Pencari Pekerjaan (org)	8.712
Tk Partisipasi Angk Kerja (TPAK)	66,41
Angka Pengangguran (%)*)	4,08

Sumber: *) Angka sementara, BPS dan Dinas Duk Capil Kab Ogan Ilir, 2009

C. Proyeksi Penduduk Kabupaten Ogan Ilir

Untuk memprediksikan jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir sampai dengan akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2029, akan digunakan pendekatan Lung Polinomial Methods, dengan dasar pemikiran bahwa perkiraan pertambahan penduduk ke depan tidak lagi selamanya mengikuti pola pertumbuhan yang berlaku di wilayah perencanaan karena sebagai daerah baru dengan potensi/peluang untuk

kemungkinan berusaha lebih baik akan menjadi daya tarik yang kuat bagi penduduk luar untuk memasuki wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

Penggunaan Metoda Lung Polinomial berlandaskan pada angka pertumbuhan ratarata Kabupaten Ogan Ilir sebesar 1,75 % per tahun akan digunakan dalam memprediksikan jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir hingga tahun 2029. Faktorfaktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Ogan Ilir tersebut diantaranya adalah:

- a. Adanya kecenderungan pertambahan migrasi masuk ke Kabupaten Ogan Ilir sehubungan dengan adanya perkiraan perkembangan kegiatan karena Ogan Ilir menjadi bagian dari Kawasan Metropolitan Palembang.
- b. Efek multiplier dari kegiatan baru yang berkembang di Kabupaten Ogan Ilir.
 Berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk yang dilakukan dengan menggunakan metode tersebut maka jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2029 adalah sebesar 616.906 jiwa. Selengkapnya proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir dapat dilihat pada Tabel 1.13

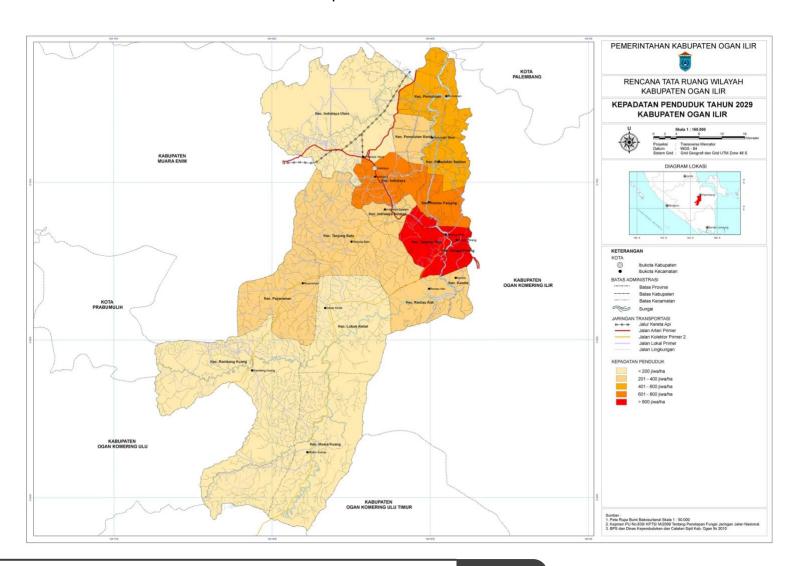
Tabel I.13
Proyeksi Penduduk Kabupaten Ogan Ilir Hingga Tahun 2029

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
NO	Recalliatali	2009	2019	2029		
1	Indralaya	44.301	57.882	75.625		
2	Indralaya Utara	22.206	26.361	31.293		
3	Indralaya Selatan	23.979	29.692	36.766		
4	Pemulutan	41.589	50.597	61.557		
5	Pemulutan Barat	14.152	16.489	19.211		
6	Pemulutan Selatan	21.362	26.858	33.769		
7	Tanjung Batu	44.856	55.761	69.317		
8	Payaraman	24.197	29.699	36.452		
9	Tanjung Raja	42.210	52.164	64.466		
10	Sungai Pinang	26.393	33.294	42.000		
11	Rantau Panjang	23.138	24.760	26.497		
12	Muara Kuang	20.820	25.404	30.998		
13	Rambang Kuang	20.649	25.295	30.986		
14	Lubuk Keliat	18.663	20.372	24.274		
15	Rantau Alai	16.295	16.492	16.691		
16	Kandis	11.993	14.139	16.670		
	OGAN ILIR	416.803	505.260	616.571		

Sumber : Hasil Analisis 2009

Peta

Kepadatan Penduduk

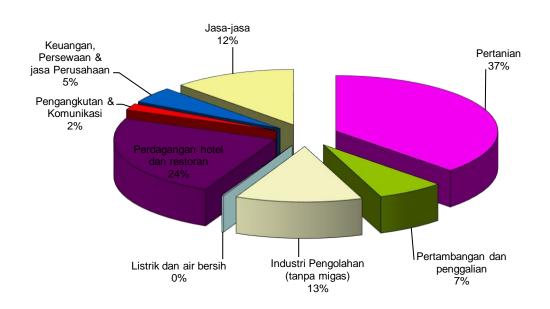


4.1.6. Perekonomian

A. Struktur Ekonomi

Nilai PDRB Kabupaten Ogan Ilir (dengan sektor migas) pada Tahun 2008 atas dasar harga konstan sebesar Rp. 1.567.460 juta,- Kontribusi sektor-sektor usaha dalam PDRB Kabupaten Ogan Ilir didominasi sektor-sektor primer dan sekunder, yang secara berurutan oleh sektor pertanian (32.17%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (20.55%), sektor bangunan (14.29%), sektor industri pengolahan (10.89%) dan sektor jasa (10.54%)

Gambar 1.8
Kontribusi Sektor-sektor terhadap PDRB Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009



Sumber: Hasil Analisis

Jika dilihat dari sejak lima tahun terakhir, struktur ekonomi Kabupaten Ogan Ilir masih berbasis pada pemanfaatan sumberdaya alam atau masih berstruktur primer. Kontribusi sektor primer tahun 2004-2008 memberikan kontribusi sekitar 40 persen dari total PDRB per tahunnya.

Tahun 2008, sektor primer memberikan kontribusi sebesar 37,66 persen (dengan migas) dari total PDRB Kabupaten Ogan Ilir. Penyumbang utama sektor primer ini adalah sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 31,39%, sumbangan terbesar

terutama dari subsektor perkebunan, khususnya perkebunan tebu, kelapa sawit dan dan karet.

Sementara itu Sektor sekunder pada tahun 2008 memberikan kontribusi sebesar 26,58 persen (dengan migas) atau 27,23 persen (tanpa migas). Penyumbang sektor sekunder ini adalah terutama dari sektor bangunan sebesar 16,26 persen, industri pengolahan 10,09 persen dan sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,22 persen.

Kontribusi sektor tersier terhadap total PDRB Kabupaten Ogan Ilir adalah sebesar 35,76 persen (dengan migas) atau 36,66 persen (tanpa migas), sektor penyumbang sektor tersier ini adalah dari sektor perdagangan, hotel dan restoran yakni sebesar 16,76 persen. Pembahasan mengenai masing-masing sektor secara lebih detil dapat dilihat pada sub-bab analisis aspek perekonomian. Kontribusi sektor-sektor terhadap nilai PDRB Kabupaten Ogan Ilir dapat dilihat pada Gambar 1.7 dan Tabel 1.9.

Tabel I.15
Peranan Masing-Masing Sektor Dalam Pembentukan
PDRB Kabupaten Ogan Ilir (dalam persen)
Tahun 2002-2008

Tahun	DENGAN MIGAS			TANPA MIGAS			
	Primer	Sekunder	Tersier	Primer	Sekunder	Tersier	
2002	40,64	25,36	34,00	39,79	25,72	34,48	
2003	40,80	25,25	33,95	39,93	25,62	34,45	
2004	41,22	25,29	33,49	40,22	25,72	34,06	
2005	41,30	25,05	33,65	39,93	25,63	34,44	
2006	40,69	25,01	34,30	39,29	25,60	35,11	
2007	39,15	25,67	35,18	37,72	26,28	36,00	
2008	37,66	26,58	35,76	36,11	27,23	36,66	

Sumber : BPS Tahun 2008

Tabel I.16

PDRB Kabupaten Ogan Ilir Dari Tahun 2004 - 2008 Atas Dasar Harga konstan
Menurut Lapangan Usaha(Juta Rupiah)

	LADANCAN LICALIA	TAHUN						
	LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007	2008		
1	Pertanian	438,811	460,317	481,217	494.778	594.200		
	a Tanaman Bahan Makanan	120,228	125,097	130,251	135.761	141.572		
	b Perkebunan	144,179	153,940	167,348	174.377	176.571		
	c Peternakan dan hasil-hasilnya	48,213	50,080	52,177	49,119	50.016		
	d Kehutanan	42,929	44,487	42,525	44.667	43.452		
	e Perikanan	83,262	86,713	88,916	90.854	92.589		
2	Pertambangan & Penggalian	73,990	77,209	81,478	85.850	90.090		
	a Minyak dan Gas Bumi	23,950	25,262	26,685	27.642	28.203		
	b Pertambangan	0	0	0	0	0		
	c Penggalian	50,040	51,947	54,793	58.208	61.887		
3	Industri Pengolahan (tanpa migas)	143,910	149,890	156,641	164.052	170.688		
	a Industri Migas	0	0	0	0	0		
	Pengilangan minyak bumi	Ö	0	0	Ö	Ö		
	Gas alam cair	0	0	0	0	0		
	b Industri bukan migas	143,910	149,890	156,641	164.052	170.688		
4		1,457	1,543	1,722	2.169	2.335		
	a Listrik	1,247	1,323	1,484	1.904	2.024		
	b Gas	0	0	0	0	0		
	c Air Bersih	210	220	238	265	311		
5	Bangunan	172,522	181,183	191,909	205.669	224.015		
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	276,215	286,710	298,069	310,340	322,043		
	a Perdagangan besar dan eceran	257,549	267,465	278,190	289,791	301,255		
	b Restoran	18,500	19,075	19,704	20,370	20,604		
	c Hotel	166	170	175	179	184		
7	Pengangkutan dan Komunikasi	19,167	20,448	21,979	23,656	25,736		
	a Pengangkutan	15,739	16,456	17,253	18,098	19,071		
	- Angkutan Jalan Raya	14,743	15,411	16,152	16,934	17,843		
	- Angkutan laut	0	0	0	0	0		
	- Angkutan Penyeberangan	833	870	914	964	1.014		
	- Angkutan Udara	0	0	0	0	0		
	- Jasa penunjang angkutan	163	175	187	200	214		
	b Komunikasi	3,428	3,992	4,726	5.558	6.665		
8	Keuangan, Persewaan, Jasa	56,005	57,427	59,025	60.639	63.205		
	Perusahaan							
	a Bank	4,333	4,458	4,598	4.759	4.957		
	b Lembaga keuangan non bank	469	496	524	552	580		
	c Sewa bangunan	45,084	46,035	47,140	48.215	50.210		
_	d Jasa perusahaan	6,119	6,438	6,763	7.113	7,458		
9	Jasa-jasa	108,785	117,004	129,447	144,557	165,148		
	a Pemerintahan umum	75,922	82,776	93,829	108,385	125,717		
	b Swasta	32,863	34,228	35,688	37,175	39,431		
	- Sosial kemasyarakatan	14,888	15,515	16,118	16,866	18,273		
	- Hiburan dan rekreasi	148	157	165	174	183		
-	- Perorangan dan rumah tangga	17,827	18,556	19,335	20,135	20,975		
10	otal Sektor (dengan migas)	1,290,862	1,351,731	1,421,487	1,492,710	1,567,460		

Sumber : BPS Kabupaten Ogan Ilir

Tabel I.17

Kontribusi Sektor Terhadap Nilai PDRB Kabupaten Ogan Ilir

Dari Tahun 2004 - 2008 Atas Dasar Harga Konstan (%)

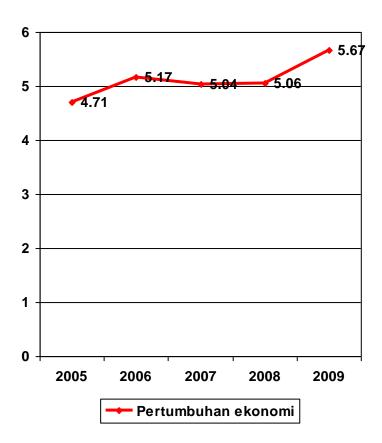
1. Pertanian 33.99 34.05 33.65 33.15 33.	LAPANGAN USAHA				TAHUN				
a Tanaman Bahan Makanan 9.31 9.25 9.16 9.09 9.03 b Perkebunan 11.17 11.39 11.77 11.68 11.26 c Peterhakan dan hasil-hasilnya 3.73 3.70 3.67 3.29 3.19 d Kehutanan 3.33 3.29 2.99 2.99 2.77 e Perikanan 6.45 6.42 6.25 6.09 5.91 2 Pertambangan & Penggalian 5.73 5.75			LAPANGAN USAHA						
b Perkebunan	1.				34.05				
c Peternakan dan hasil-hasilnya 3.73 3.70 3.67 3.29 3.19 d Kehutanan 3.33 3.29 2.99 2.77 e Pertkanan 6.45 6.42 6.25 6.09 5.91 2. Pertambangan & Penggalian 5.73 5.75 5.75 5.75 a Pertambangan 0.00<		a	Tanaman Bahan Makanan						
d Kehutanan		b	Perkebunan						
Pertambangan & Penggalian 5.73 5.71 5.73 5.75 5.75		С	Peternakan dan hasil-hasilnya						
2. Pertambangan 5.73 5.71 5.73 5.75 5.75 a Pertambangan 0.00 0.02 0.02 10.22 11.09 11.02 11.09 11.02 11.09 11.02 11.09 11.02 11.09 11.02 11.09 11.02 11.09 11.02 11.09 11.02 11.09 11.02 11.09 11.02 11.09 11.02 11.09 11.02 11.09 11.02 11.09 11.02 11.09 11.02 11.09 11.02 11.09 11.02 11.09 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02<		d		3.33	3.29		2.99	2.77	
a Pertambangan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.90 3.95 3.95 3.90 3.95 3.95 3.90 3.95 3.95 3.90 3.95 3.95 3.95 3.95 3.90 3.95 3.95 3.95 3.90 3.95 3.95 3.90 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.25		е	Perikanan						
b Penggalian 3.88 3.84 3.85 3.90 3.95	2.	Per	tambangan & Penggalian	5.73		5.73	5.75	5.75	
3. Industri Pengolahan (tanpa migas) 11.15 11.09 11.02 10.99 10.89 4. Listrik dan Air Bersih 0.11 0.11 0.12 0.15 0.15 a Listrik 0.10 0.10 0.10 0.10 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 1.31 1.4 1.14 1.		a		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. Listrik dan Air Bersih 0.11 0.11 0.12 0.15 0.15 a Listrik 0.10 0.10 0.10 0.13 0.13 b Air Bersih 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 5. Bangunan 13.36 13.40 13.50 13.78 14.29 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 21.40 21.21 20.97 20.79 20.55 a Perdagangan besar dan eceran 19.95 19.79 19.57 19.41 19.22 b Restoran 1.43 1.41 1.39 1.36 1.31 c Hotel 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 7. Pengangkutan dan Komunikasi 1.48 1.51 1.55 1.58 1.64 a Pengangkutan Jalan Raya 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14		b	Penggalian	3.88	3.84	3.85	3.90	3.95	
a Listrik 0.10 0.10 0.10 0.13 0.13 b Air Bersih 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 5. Bangunan 13.36 13.40 13.50 13.78 14.29 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 21.40 21.21 20.97 20.79 20.55 a Perdagangan besar dan eceran 19.95 19.79 19.57 19.41 19.22 b Restoran 1.43 1.41 1.39 1.36 1.31 c Hotel 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 7. Pengangkutan dan Komunikasi 1.48 1.51 1.55 1.58 1.64 a Pengangkutan 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 - Angkutan Jalan Raya 1.14 1.14 1.14 1.13 1.14 - Angkutan laut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Angkutan Udara 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 - Angkutan Udara 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Jasa penunjang angkutan 0.27 0.30 0.33 0.37 0.43 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4.34 4.25 4.15 4.06 4.03 a Bank 0.34 0.33 0.32 0.32 0.32 b Lembaga keuangan non bank 0.04 0.04 0.04 0.04 c Sewa bangunan 3.49 3.41 3.32 3.23 3.20 d Jasa perusahaan 0.47 0.48 0.48 0.48 9. Jasa-jasa 8.43 8.66 9.11 9.75 10.54 a Pemerintahan umum 5.88 6.12 6.60 7.26 8.02 b Swasta 2.55 2.53 2.51 2.49 2.52 - Sosial kemasyarakatan 1.15 1.15 1.13 1.13 1.17 - Hiburan dan rekreasi 0.01 0.01 0.01 0.01 - Perorangan dan rumah tanga 1.38 1.37 1.36 1.35 1.34 Total Sektor 100.00 100.00 100.00 100.00	3.	Ind	ustri Pengolahan (tanpa migas)	11.15	11.09	11.02	10.99	10.89	
b Air Bersih 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 5. Bangunan 13.36 13.40 13.50 13.78 14.29 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 21.40 21.21 20.97 20.79 20.55 a Perdagangan besar dan eceran 19.95 19.79 19.57 19.41 19.22 b Restoran 1.43 1.41 1.39 1.36 1.31 c Hotel 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 7. Pengangkutan dan Komunikasi 1.48 1.51 1.55 1.58 1.64 a Pengangkutan 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 - Angkutan Jalan Raya 1.14 1.1	4.	List		0.11		0.12	0.15	0.15	
5. Bangunan 13.36 13.40 13.50 13.78 14.29 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 21.40 21.21 20.97 20.79 20.55 a Perdagangan besar dan eceran 19.95 19.79 19.57 19.41 19.22 b Restoran 1.43 1.41 1.39 1.36 1.31 c Hotel 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 7. Pengangkutan dan Komunikasi 1.48 1.51 1.55 1.58 1.64 a Pengangkutan 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 - Angkutan Jalan Raya 1.14 1.14 1.14 1.14 1.13 1.14 - Angkutan laut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Angkutan Udara 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Jasa penunjang angkutan 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01		а	Listrik						
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 21.40 21.21 20.97 20.79 20.55 a Perdagangan besar dan eceran 19.95 19.79 19.57 19.41 19.22 b Restoran 1.43 1.41 1.39 1.36 1.31 c Hotel 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 7. Pengangkutan dan Komunikasi 1.48 1.51 1.55 1.58 1.64 a Pengangkutan 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 - Angkutan Jalan Raya 1.14 <td></td> <td>b</td> <td>Air Bersih</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		b	Air Bersih						
a Perdagangan besar dan eceran 19.95 19.79 19.57 19.41 19.22 b Restoran 1.43 1.41 1.39 1.36 1.31 c Hotel 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 7. Pengangkutan dan Komunikasi 1.48 1.51 1.55 1.58 1.64 a Pengangkutan 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 1.21	5.								
b Restoran 1.43 1.41 1.39 1.36 1.31 c Hotel 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 7. Pengangkutan dan Komunikasi 1.48 1.51 1.55 1.58 1.64 a Pengangkutan 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 - Angkutan Jalan Raya 1.14 1.14 1.14 1.14 1.11 1.11 1.11 1.14 1.14 1.14 1.14 1.11 1.11 1.14	6.	Per	dagangan, Hotel dan Restoran						
c Hotel 0.01 0.01 0.01 0.01 7. Pengangkutan dan Komunikasi 1.48 1.51 1.55 1.58 1.64 a Pengangkutan 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 - Angkutan Jalan Raya 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.13 1.14 - Angkutan laut 0.00 0.0		a	Perdagangan besar dan eceran	19.95			19.41	19.22	
7. Pengangkutan dan Komunikasi 1.48 1.51 1.55 1.58 1.64 a Pengangkutan 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 - Angkutan Jalan Raya 1.14 </td <td></td> <td>b</td> <td>Restoran</td> <td>1.43</td> <td></td> <td>1.39</td> <td>1.36</td> <td>1.31</td>		b	Restoran	1.43		1.39	1.36	1.31	
a Pengangkutan 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 - Angkutan Jalan Raya 1.14 1.14 1.14 1.14 1.13 1.14 - Angkutan laut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Angkutan Penyeberangan 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 - Angkutan Udara 0.00					0.01			0.01	
- Angkutan Jalan Raya 1.14 1.14 1.14 1.13 1.14 - Angkutan laut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Angkutan Penyeberangan 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 - Angkutan Udara 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Jasa penunjang angkutan 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - B Komunikasi 0.27 0.30 0.33 0.37 0.43 - Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4.34 4.25 4.15 4.06 4.03 - B Bank 0.34 0.33 0.32 0.32 0.32 - B Lembaga keuangan non bank 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 - C Sewa bangunan 3.49 3.41 3.32 3.23 3.20 - D Jasa-jasa 8.43 8.66 9.11 9.75 10.54 - B Pemerintahan umum 5.88 6.12 6.60 7.26 8.02 - Sosial kemasyarakatan 1.15 1.13 1.13 1.17 - Hiburan dan rekreasi 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - Perorangan dan rumah tangga 1.38 1.37 1.36 1.35 1.34 - Total Sektor 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	7.	Per	ngangkutan dan Komunikasi	1.48		1.55		1.64	
- Angkutan laut		a	Pengangkutan	1.22	1.22				
- Angkutan Penyeberangan			- Angkutan Jalan Raya	1.14	1.14	1.14	1.13	1.14	
- Angkutan Udara 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Jasa penunjang angkutan 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 b Komunikasi 0.27 0.30 0.33 0.37 0.43 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4.34 4.25 4.15 4.06 4.03 a Bank 0.34 0.33 0.32 0.32 0.32 b Lembaga keuangan non bank 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 c Sewa bangunan 3.49 3.41 3.32 3.23 3.20 d Jasa perusahaan 0.47 0.48 0.48 0.48 0.48 9. Jasa-jasa 8.43 8.66 9.11 9.75 10.54 a Pemerintahan umum 5.88 6.12 6.60 7.26 8.02 b Swasta 2.55 2.53 2.51 2.49 2.52 - Sosial kemasyarakatan 1.15 1.15 1.13 1.13 1.17 - Hiburan dan rekreasi 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - Perorangan dan rumah tangga 1.38 1.37 1.36 1.35 1.34 Total Sektor 100.00 100.00 100.00 100.00									
- Jasa penunjang angkutan 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 b Komunikasi 0.27 0.30 0.33 0.37 0.43 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4.34 4.25 4.15 4.06 4.03 a Bank 0.34 0.33 0.32 0.32 0.32 0.32 b Lembaga keuangan non bank 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 c Sewa bangunan 3.49 3.41 3.32 3.23 3.20 d Jasa perusahaan 0.47 0.48 0.48 0.48 0.48 9. Jasa-jasa 8.43 8.66 9.11 9.75 10.54 a Pemerintahan umum 5.88 6.12 6.60 7.26 8.02 b Swasta 2.55 2.53 2.51 2.49 2.52 - Sosial kemasyarakatan 1.15 1.15 1.15 1.13 1.13 1.17 - Hiburan dan rekreasi 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - Perorangan dan rumah tangga 1.38 1.37 1.36 1.35 1.34 Total Sektor 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00			- Angkutan Penyeberangan			0.06	0.06	0.06	
b Komunikasi 0.27 0.30 0.33 0.37 0.43 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4.34 4.25 4.15 4.06 4.03 a Bank 0.34 0.33 0.32 0.32 0.32 b Lembaga keuangan non bank 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 c Sewa bangunan 3.49 3.41 3.32 3.23 3.20 d Jasa perusahaan 0.47 0.48 0.48 0.48 0.48 9. Jasa-jasa 8.43 8.66 9.11 9.75 10.54 a Pemerintahan umum 5.88 6.12 6.60 7.26 8.02 b Swasta 2.55 2.53 2.51 2.49 2.52 - Sosial kemasyarakatan 1.15 1.15 1.15 1.13 1.13 1.17 - Hiburan dan rekreasi 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - Per				0.00	0.00	0.00		0.00	
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4.34 4.25 4.15 4.06 4.03 a Bank 0.34 0.33 0.32 0.32 0.32 b Lembaga keuangan non bank 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 c Sewa bangunan 3.49 3.41 3.32 3.23 3.20 d Jasa perusahaan 0.47 0.48 0.48 0.48 0.48 9. Jasa-jasa 8.43 8.66 9.11 9.75 10.54 a Pemerintahan umum 5.88 6.12 6.60 7.26 8.02 b Swasta 2.55 2.53 2.51 2.49 2.52 - Sosial kemasyarakatan 1.15 1.15 1.13 1.13 1.17 - Hiburan dan rekreasi 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - Perorangan dan rumah tangga 1.38 1.37 1.36 1.35 1.34 Total Sektor 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00			- Jasa penunjang angkutan						
a Bank 0.34 0.33 0.32 0.32 0.32 b Lembaga keuangan non bank 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 c Sewa bangunan 3.49 3.41 3.32 3.23 3.20 d Jasa perusahaan 0.47 0.48 0.48 0.48 0.48 9. Jasa-jasa 8.43 8.66 9.11 9.75 10.54 a Pemerintahan umum 5.88 6.12 6.60 7.26 8.02 b Swasta 2.55 2.53 2.51 2.49 2.52 - Sosial kemasyarakatan 1.15 1.15 1.13 1.13 1.17 - Hiburan dan rekreasi 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - Perorangan dan rumah tangga 1.38 1.37 1.36 1.35 1.34 Total Sektor 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00			Komunikasi						
b Lembaga keuangan non bank 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 c Sewa bangunan 3.49 3.41 3.32 3.23 3.20 d Jasa perusahaan 0.47 0.48 0.48 0.48 0.48 9. Jasa-jasa 8.43 8.66 9.11 9.75 10.54 a Pemerintahan umum 5.88 6.12 6.60 7.26 8.02 b Swasta 2.55 2.53 2.51 2.49 2.52 - Sosial kemasyarakatan 1.15 1.15 1.13 1.13 1.17 - Hiburan dan rekreasi 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - Perorangan dan rumah tangga 1.38 1.37 1.36 1.35 1.34 Total Sektor 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	8.	Keι	langan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4.34	4.25	4.15	4.06	4.03	
c Sewa bangunan 3.49 3.41 3.32 3.23 3.20 d Jasa perusahaan 0.47 0.48 0.48 0.48 0.48 9. Jasa-jasa 8.43 8.66 9.11 9.75 10.54 a Pemerintahan umum 5.88 6.12 6.60 7.26 8.02 b Swasta 2.55 2.53 2.51 2.49 2.52 - Sosial kemasyarakatan 1.15 1.15 1.13 1.13 1.17 - Hiburan dan rekreasi 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - Perorangan dan rumah tangga 1.38 1.37 1.36 1.35 1.34 Total Sektor 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00		a	Bank	0.34		0.32	0.32	0.32	
d Jasa perusahaan 0.47 0.48 0.48 0.48 0.48 9. Jasa-jasa 8.43 8.66 9.11 9.75 10.54 a Pemerintahan umum 5.88 6.12 6.60 7.26 8.02 b Swasta 2.55 2.53 2.51 2.49 2.52 - Sosial kemasyarakatan 1.15 1.15 1.13 1.13 1.17 - Hiburan dan rekreasi 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - Perorangan dan rumah tangga 1.38 1.37 1.36 1.35 1.34 Total Sektor 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00		b							
9. Jasa-jasa 8.43 8.66 9.11 9.75 10.54 a Pemerintahan umum 5.88 6.12 6.60 7.26 8.02 b Swasta 2.55 2.53 2.51 2.49 2.52 - Sosial kemasyarakatan 1.15 1.15 1.13 1.13 1.17 - Hiburan dan rekreasi 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - Perorangan dan rumah tangga 1.38 1.37 1.36 1.35 1.34 Total Sektor 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00			Sewa bangunan						
a Pemerintahan umum 5.88 6.12 6.60 7.26 8.02 b Swasta 2.55 2.53 2.51 2.49 2.52 - Sosial kemasyarakatan 1.15 1.15 1.13 1.13 1.17 - Hiburan dan rekreasi 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - Perorangan dan rumah tangga 1.38 1.37 1.36 1.35 1.34 Total Sektor 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00		d	Jasa perusahaan						
b Swasta 2.55 2.53 2.51 2.49 2.52 - Sosial kemasyarakatan 1.15 1.15 1.13 1.13 1.17 - Hiburan dan rekreasi 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - Perorangan dan rumah tangga 1.38 1.37 1.36 1.35 1.34 Total Sektor 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	9.	Jas							
- Sosial kemasyarakatan 1.15 1.15 1.13 1.17 - Hiburan dan rekreasi 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - Perorangan dan rumah tangga 1.38 1.37 1.36 1.35 1.34 Total Sektor 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00									
- Hiburan dan rekreasi 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - Perorangan dan rumah tangga 1.38 1.37 1.36 1.35 1.34 Total Sektor 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00		b							
- Perorangan dan rumah tangga 1.38 1.37 1.36 1.35 1.34 Total Sektor 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00			- Sosial kemasyarakatan						
Total Sektor 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00			- Hiburan dan rekreasi						
			- Perorangan dan rumah tangga						
Imbor : Hasil Analisis				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

Sumber: Hasil Analisis

B.Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan angka sangat sementara BPS telah dicapai Peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi mencapai **4,71** %, pada tahun 2006 menjadi **5,17** % dan pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi sebesar **5,03** %, pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Ilir mencapai **5,06** %, serta pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi **5,60** % PDRB dengan Migas dan **5,67** % PDRB tanpa Migas. Pada tahun 2009 pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Ogan Ilir sebesar 5,67 % (PDRB tanpa Migas), sektor yang memberikan andil pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah : Sektor Komunikasi sebesar 20,33 %, Sektor Jasa-jasa Pemerintah dan Swasta dengan pertumbuhan sebesar 15,01 %, pertumbuhan Sektor Bangunan sebesar 9,06 %, Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dengan pertumbuhan sebesar 8,16 %. Rincian andil pertumbuhan masing-masing sektor lapangan usaha tahun 2005 sampai 2009 Kabupaten Ogan Ilir tampak pada grafik dan tabel berikut.



Gambar 1. 9 Grafik Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ogan Ilir tahun 2005 sampai 2009

Tabel I.18

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 sampai 2009 menurut sektor lapangan usaha.

Sektor Lapangan Usaha	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (%)					
Sector Euparigan Osana	2005	2006	2007	2008	2009	
A. Pertanian	4,89	4,54	2,82	1,90	2,02	
B. Pertambangan dan Penggalian	4,35	5,53	5,37	4,94	5,84	
C. Industri Pengolahan	4,16	4,50	4,73	4,05	4,10	
D. Listrik, Gas dan Air Bersih	5,90	11,60	25,96	7,65	8,16	
E. Bangunan/kontruksi	5,02	5,92	7.17	8,92	9,06	
F. Perdagangan, Hotel & Rest	3,80	3,96	4.12	3,77	4.23	
G. Pengangkutan dan Komunikasi	6,68	7,49	7,63	8,79	9,42	
H. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2,54	2,78	2,73	4,23	6,22	
I. Jasa-jasa Pemerintah dan Swasta	7,56	10,69	12,38	13,46	15,01	
PDRB DENGAN MIGAS	4,71	5,17	5,01	5,01	5,60	
PDRB TANPA MIGAS	4,70	5,16	5,03	5,06	5,67	

Keterangan : LP = Laju Pertumbuhan

Tabel I.19
Laju Pertumbuhan Nilai Kabupaten Ogan Ilir
Dari Tahun 2000 - 2007 Atas Dasar Harga Konstan (%)

		LAPANGAN USAHA	TAHUN					
		LAPANGAN USAHA	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2007-2008	Rata2	
1.	Pertanian		4.90	4.89	4.54	2.82	4.29	
	a	Tanaman Bahan Makanan	3.69	4.05	4.12	4.23	4.02	
	b	Perkebunan	6.12	6.77	8.71	4.20	6.45	
	С	Peternakan dan hasil-hasilnya	3.63	3.87	4.19	-5.86	1.46	
	d	Kehutanan	3.91	3.63	-4.41	5.04	2.04	
	е	Perikanan	5.83	4.14	2.54	2.18	3.67	
2.	Per	tambangan & Penggalian	4.10	4.35	5.53	5.37	4.84	
	a	Minyak dan gas bumi	5.28	4.48	5.63	3.59	4.75	
	b	Penggalian	3.55	3.81	5.48	6.23	4.77	
3.	Ind	ustri Pengolahan (tanpa migas)	4.00	4.16	4.50	4.73	4.35	
4.	Lis	trik dan Air Bersih	4.74	5.90	11.60	25.96	12.05	
	а	Listrik	4.88	6.09	12.17	28.30	12.86	
	b	Air Bersih	3.96	4.76	8.18	11.34	7.06	
5.	Baı	ngunan	4.69	5.02	5.92	7.17	5.70	
6.	Per	dagangan, Hotel dan Restoran	3.72	3.80	3.96	4.12	3.90	
	a	Perdagangan besar dan eceran	3.77	3.85	4.01	4.17	3.95	
	b	Restoran	2.98	3.11	3.30	3.38	3.19	
	С	Hotel	2.47	2.41	2.94	2.29	2.53	
7.	Pengangkutan dan Komunikasi		5.06	6.68	7.49	7.63	6.72	
	a	Pengangkutan	4.45	4.56	4.84	4.90	4.69	
		- Angkutan Jalan Raya	4.42	4.53	4.81	4.84	4.65	
		- Angkutan laut	-	-	-	-	-	

LAPANGAN USAHA			TAHUN							
			2003-2004	2004-2005	2005-2006	2007-2008	Rata2			
		- Angkutan Penyeberangan	4.52	4.44	5.06	5.47	4.87			
		- Angkutan udara	-		-	-	-			
	- Jasa penunjang angkutan		7.24	7.36	6.86	6.95	7.10			
	b	Komunikasi	7.97	16.45	18.39	17.60	15.10			
8.		uangan, Persewaan, Jasa rusahaan	2.30	2.54	2.78	2.73	2.59			
	a	Bank	2.87	2.88	3.14	3.50	3.10			
	b	Lembaga keuangan non bank	5.63	5.76	5.65	5.34	5.60			
	С	Sewa bangunan	1.96	2.11	2.40	2.28	2.19			
	d	Jasa perusahaan	4.17	5.21	5.05	5.18	4.90			
9.	Jas	a-jasa	4.83	7.56	10.69	12.38	8.87			
	a	Pemerintahan umum	5.14	9.03	13.35	15.51	10.76			
	b	Swasta	4.11	4.15	4.27	4.17	4.18			
		- Sosial kemasyarakatan	4.18	4.21	4.34	4.19	4.23			
		- Hiburan dan rekreasi	5.71	4.21	5.10	5.45	5.12			
		- Perorangan dan rumah tangga	4.03	4.09	4.20	4.14	5.12			
Tota	al Sel	tor	4.21	4.35	4.71	5.17	4.61			

Sumber: Hasil Analisis

Gambar 1.10 Ruko di Kecamatan Indralaya



Gambar 1.11 Perdagangan di Kecamatan Tanjung Raja



B. Analisis Sektor Basis

Analisis perekonomian ini akan membahas mengenai kinerja sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Ogan Ilir serta peranannya dalam lingkup Propinsi Sumatera Selatan. Kajian akan mencakup analisis penentuan sektor-sektor unggulan (sektor-sektor basis) yaitu sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap kegiatan perekonomian di Kabupaten Ogan Ilir.

Penentuan sektor-sektor basis dimaksudkan untuk menentukan pengaruh dari perubahan-perubahan ekonomi lokal dan untuk memproyeksi ke depan dari ekonomi lokal tersebut. Hal ini membantu kita untuk lebih fokus perhatiannya pada sektor-sektor ekonomi penting yang mempengaruhi keseluruhan perekonomian Kabupaten Ogan Ilir. Metoda yang dilakukan adalah metoda LQ (*Location Quotient*). Metoda ini

digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam sektor kegiatan tertentu. Dalam perhitungan dengan metoda LQ ini akan digunakan data PDRB Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 (Atas Dasar Harga Konstan 2000).

Tabel 1.20
Hasil Perhitungan Sektor Basis Dengan Metoda LQ

	SEKTOR	PDRB KAB. OGAN ILIR TAHUN 2009	PDRB PROP. SUMATERA SELATAN 2009	NILAI LQ
1	Pertanian	504.200	11.567.788	1,56
2	Pertambangan & Penggalian	90.090	13.616.652	0.24
3	Industri Pengolahan (tanpa migas)	170.688	8.022.589	0.76
4	Listrik dan Air Bersih	2.335	281.069	0.30
5	Bangunan	224.015	4.412.936	1.81
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	322.043	8.101.478	1.42
7	Pengangkutan dan Komunikasi	25.736	2.886.983	0.32
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	63.205	2.386.939	0,94
9	Jasa-jasa	166.048	2.386.939	1.26
	TOTAL SEKTOR	1.568.360	55.964.852	

Sumber : Hasil Analisis

Dari hasil perhitungan dengan metoda LQ tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sektor-sektor yang merupakan basis ekonomi di Kabupaten Ogan Ilir adalah sektor bangunan, sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

C. Analisis Potensi Sektoral

Pada bagian ini akan dianalisis lebih lanjut sektor-sektor yang menjadi penggerak roda perekonomian dalam pengembangan wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

1. Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pada tahun 2005 jenis dan luas penggunaan lahan di Kabupaten Ogan Ilir 65 % lebih sudah diusahakan. Usaha tanaman pangan dan hortikultura baru terbatas pada tanaman padi sawah, padi ladang, palawija, dan beberapa tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan.

• Tanaman Padi

Persawahan lebak yang ada di Kabupaten Ogan Ilir dari luas potensi 67.139 ha pada tahun 2008, baru diusahakan seluas 41.522 ha (66,11%), sehingga masih dimungkinkan perluasan areal padi sawah lebak dan semi tadah hujan seluas 23.000 ha lebih. Pencetakan sawah baru sangat berpotensi di Kecamatan Indralaya dan Pemulutan (lahan irigasi Ogan-Keramasan 1 dan Ogan-Keramasan 2), serta lahan lebak Palas Muara Kuang yang sangat luas, yang dapat dikembangkan sampai 11.000 ha lebih. Produksi padi sawah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2009 mencapai 199.449 ton, dapat memenuhi kebutuhan beras untuk konsumsi penduduk.

Di antara berbagai jenis padi, yang cukup terkenal dari Ogan Ilir ialah padi pegagan. Dahulu beras pegagan sangat populer bagi masyarakat Sumatera Selatan bahkan sampai tempat lain di luar kawasan ini. Beras Pegagan merupakan beras asli Ogan Ilir. Aromanya yang khas, produksinya cukup tinggi, dan cocok tumbuh di sawah lebak di kawasan irigasi Ogan Keramasan dan beberapa kawasan lebak lainnya di Ogan Ilir.

Tanaman Palawija

Dalam kawasan agropolitan Indralaya dan kawasan transmigrasi Indralaya Utara, yang luasnya mencapai 30.000 Ha lebih mulai dikembangkan beberapa tanaman palawija seperti jagung, kacang-kacangan dan ubi. Komoditi jagung berpeluang besar dikembangkan pada kawasan agropolitan Indralaya karena didukung teknologi Agro Techno Park (ATP) dan adanya dua unit pabrik pengolahan jagung menjadi pakan ternak milik PT.Thamrin Brothers.

Luas tanaman jagung tahun 2009 adalah 582 ha, dengan produksi 3.138 ton dirasakan masih perlu pengembangan mengingat masih tersedianya lahan yang cukup luas di daerah ini.

Tabel I.21
Perkembangan Produksi Padi dan Palawija dalam
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 - 2009.

Komoditi Tanaman	2005	2006	2007	2008	2009	Perkembangan
Padi sawah	148.510	157.612	182.015	185.447	199.449	50.939
Padi Gogo	5.325	7.722	6.309	6.305	6.136	811

Total Padi	153.835	165.334	188.324	191.752	205.585	51.750
Jagung	853	1.746	3.637	4.348	3.138	2.285
Kedelai	44	208	31	178	53	9
Kac. Tanah	253	538	272	248	272	19
Kac. Hijau	40	49	166	72	84	44
Ubi Kayu	2.140	2.580	4.201	4.855	5.337	3.197
Ubi Jalar	375	322	774	1.166	2.292	1.917

Sumber: Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2009

Komoditas lainnya yang dikembangkan adalah kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Walaupun luas tanah kacang tanah belum begitu luas, namun sangat berpotensi untuk dikembangkan di daerah ini. Hal ini didukung oleh cocoknya jenis tanah dan iklim serta petani sudah terbiasa menanam kacang tanah ini. Kacang tanah sangat dibutuhkan sebagai bahan baku industri kacang goreng seperti kacang garuda dan lain-lain. Kacang tanah juga banyak ditanam pada lahan lebak pematang pada saat awal musim kemarau bersamaan dengan penanaman tanaman padi sawah lebak.

Nenas

Selain tanaman pangan, Ogan Ilir terkenal pula dengan buah nenasnya. Kabupaten Ogan Ilir juga terkenal dengan Buah Nenas, yang merupakan tanaman khas bagi Peladang di desa-desa dalam Kecamatan Tanjung Batu, Payaraman, Lubuk Keliat, Rambang Kuang dan Kecamatan Muara Kuang. Nenas Ogan Ilir sangat populer dalam masyarakat Sumatera Selatan, dan di Pulau Jawa dikenal dengan kategori nenas Palembang, bersama nenas yang berasal dari Muara Enim dan Kota Prabumulih.

Buah Nenas masih dalam bentuk segar dipasarkan ke Jakarta, Hanya sebagian kecil yang dijual ke Palembang dan pasar lokal. Areal tanaman nenas di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2007 mencapai 2.950 ha dengan produksi mencapai 69.187 ton masih berpeluang untuk dikembangkan menjadi perkebunan besar dan industri pengolahan nenas, yaitu di Kecamatan Tanjung Batu, Payaraman, Lubuk Keliat, Muara Kuang dan Kecamatan Rambang Kuang.

Jeruk

Jeruk manis dan jenis jeruk siam sangat potensial dan dapat dikembangkan lebih optimal terutama di sepanjang Sungai Ogan meliputi Kecamatan Muara Kuang, Tanjung Raja, Indralaya dan Rantau Alai. Luas tanam tahun 2007 adalah 1.067 ha dengan produksi 22.431 ton, selain dipasarkan dalam bentuk segar, juga dapat diolah menjadui sirup. Jeruk lemonty yang ada, juga sangat peluang untuk dikembangkan menjadi sentra produksi terutama di kawasan agropolitan Indralaya Utara dan Kecamatan Rantau Alai. Saat ini produksi jeruk lemonty telah dipasarkan ke Pulau Jawa terutama sebagai bahan baku shampoo.

Pisang

Tanaman pisang yang banyak tumbuh dan berkembang di sepanjang Sungai Ogan, antara lain jenis pisang ambon, pisang gadis, pisang kepok, pisang kapas, pisang gedah, dan pisang mas dengan sentra produksi di Kecamatan Tanjung Raja, Indralaya, Rantau Alai, Indralaya Selatan, dan Kecamatan Rantau Panjang.

2. Perkebunan dan Kehutanan

Potensi Komoditi perkebunan terluas di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2009 masih diduduki oleh tanaman karet milik rakyat yang mencapai luas 29.301 hektar, dan kelapa sawit rakyat seluas 2.860 hektar.

Pada tahun 2009, luas tanaman karet rakyat mencapai luas 29.301 ha dan produksi 24.566,7 ton, kelapa sawit rakyat seluas 2.860 ha dan produksi 3.240 ton, luas tanaman Kelapa Dalam seluas 478 ha, dan Tebu rakyat seluas 293 ha. Perkebunan Besar yang dikelola oleh PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis mencapai areal 13.188 hektar dan produksi 890.641 ton tebu giling, Perkebunan Besar Swasta tanaman karet dengan luas areal 6.059,7 hektar dan produksi 5.991 ton, Perkebunan Besar Swasta Kelapa Sawit mencapai areal 4.780 hektar dan produksi 81.432 ton.

Tabel I. 22
Potensi Luas Areal dan Produksi Komoditi

	Perkebunan Kabu	paten Ogan	Ilir Tahun	2005-2009
--	-----------------	------------	------------	-----------

Uraian	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009
Karet Rakyat : - Luas areal - Produksi	18.700 ha 11.620 ton	26.800 ha 17.486,9 ton	28.150,0 ha 18.140,0 ton	28.827 ha 18.384 ton	29.301 ha 24.566,7 ton
Karet PBS : - Luas Areal - Produksi	4.888 ha 5.074 ton	7.558,8 ha 10.355,97 ton	7.558,8 ha 10.450,0 ton	6.059,7 ha 5940,3 ton	6.059,70 ha 5.991 ton
Tebu Rakyat - Luas Areal - Produksi	207 ha 3.006 ton (gula pasir)	299 ha 12.771,9 ton (Tebu giling)	352,0 ha 19.712,0 ton (Tebu giling)	221 ha 12.376 ton (Tebu giling)	293 ha 12.391 ton (Tebu giling)
Tebu PTPN VII - Luas Areal - Produksi	13.188 ha 46.295 ton (gula pasir)	12.064 ha 851.386 ton (tebu giling)	12.410 ha 876.431 ton (tebu giling)	13.188 ha 67.000 ton (Gula pasir)	13.188 ha 890.641 ton (tebu giling)
Kelapa Sawit Rakyat - Luas Areal - Produksi	715 ha 7.512 ton	1.715 ha 1.166,4 ton	2.815,5 ha 1.180,0 ton	2.740,5 ha 1.148,0 ton	2.860 ha 3.240 ton
Kelapa Sawit PBS - Luas Areal - Produksi	4.524 ha 50.000 ton	4.033 ha 89.264 ton	4.033 ha 89.264 ton	4.780 ha 81.432 ton	4.780 ha 81.432 ton
Kelapa Rakyat - Luas Areal - Produksi	596 ha 151 ton	583 ha 339,9 ton	594 ha 342,0 ton	464 ha 267 ton	478 ha 342 ton

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab Ogan Ilir, 2005-2010

Pembangunan sektor kehutanan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir meliputi Perhutanan Rakyat dan Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan, sedangkan areal hutan negara tidak terdapat di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir, kecuali areal eks lahan PT PATRATANI Bakung yang telah ditinggalkan merupakan Lahan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) yang sebagian besar sudah dipergunakan oleh masyarakat. Produksi hutan meliputi jenis kayu cerucuk untuk pertukangan, kayu karet dan kayu akasia untuk bahan baku industry kayu lapis dan industry bubur kayu *Multi Density Fulp* (MDF), *industry Moulding* dan lain-lain.

Beberapa perusahaan yang menggunakan bahan baku kehutanan di Kabupaten Ogan Ilir dengan produksi masing-masing tahun 2005 sampai 2009 tampak pada table berikut.

Tabel I.23
Perkembangan Perusahaan Industri Kehutanan
Kabupaten Ogan Ilir tahun 2005 - 2009

No	Uraian	Th 2005 (ton)	Th 2006 (ton)	Th 2007 (ton)	Th 2008 (ton)	Th 2009 (ton)
1.	PT Sumatra Prima Pibreboard (kayu MDF)	61.279,379	50.993,457	87.806,479	76.270,029	53.542,388
2.	PT Kedukan jaya (kayu panel)	475,240	317,356	247,345	186,310	-
3	PT Asialog (Kayu Moulding)	4.752.400	1.850,939	1.317,209	695,020	216,8637
4.	PT Wana Lestari Indah (Moulding)	6.857,867	6.560,683	10.330,441	2.403,910	10.132,330
5.	PT Wana Indah Puri L (Playwood)	1.106,105	570,589	570,112	323,901	141,7475
6.	CV Raja Utama / Davi Brother (Kayugergajian)	-	-	1.820,959	1.636,825	1.349,4568

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab Ogan Ilir, 2005-2010

3. Pariwisata dan Seni Daerah

Seni rupa dan kerajinan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir telah mencapai kemampuan Estetika dan kemampuan Artistik yang tinggi. Kondisi ini dapat dilihat dari berbagai karya seni rupa yang bersifat terapan dengan wujud seni ukir kayu, seni kerajinan emas dan perak, seni ukir keramik, seni tenun songket dan tenun ikat, seni sulam border, seni pertukangan kayu, dan seni pandai besi dan aluminium.

Pada umumnya seni asli yang ada di tengah masyarakat sampai saat ini sebagian besar masih bersifat turun temurun. Namun demikian secara bertahap mulai diadakan pembinaan dengan polesan teknologi. Disamping keahlian turun temurun diatas, saat ini di Kabupaten Ogan ilir juga ada kesenian yang berkembang di tengah masyarakat yaitu kesenian drama Dul Muluk, gitar tunggal, hadrah/terbangan, dan kesenian legenda rakyat seperti Parang Betuah, Putri Pinang Masak, dan lain-lain.

Objek Wisata yang ada antara lain Lebung Karangan, kawasan wisata Tanjung Putus Indralaya dan Pantai Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Batu. Selain itu, pengembangan agrowisata yang sedang dilakukan adalah agrowisata perkebunan karet Tambangan Rambang, agropolitan Indralaya, perkebunan tebu Cinta Manis Ketiau, dan perkebunan Sawit Bumi Sawit Permai di Tanjung Miring, Rambang Kuang.

Prasarana wisata yang akan dikembangkan dan memiliki peluang investasi pada sektor pariwisata yaitu kawasan wisata Tanjung Putus Sungai Kelekar Indralaya,

wisata Rohani di pondok pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga, taman rekreasi kota Pulau Kihaji, hotel dan restoran, serta hutan kota di Indralaya. Showroom produk industri dan kerajinan rakyat di Tanjung Seteko.

Obyek wisata selanjutnya ialah Gedung Dewan Kerajinan Rakyat Nasional Daerah Ogan Ilir di Jaka Baring Palembang. Sementara itu objek wisata yang sudah ada dan dapat dikembangkan lagi adalah objek Wisata dan Lebung Karangan, objek agrowisata kawasan Agropolitan di Lokasi ATP Bakung Indralaya Utara; objek Agrowisata Perkebunan Cinta Manis di Kecamatan Tanjung Batu, Perkebunan Karet Bumi Rambang Kramajaya dan kelapa sawit Bumi Sawit Permai di Kecamatan Rambang Kuang; objek wisata Pemancingan Alam di Kecamatan Indralaya dan Pemulutan.

Obyek wisata lainnya ialah peninggalan sejarah dan legenda Parang Betuah di Desa Tanjung Baru Burai, Putri Pinang Masak di Desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu, dan kelompok makam Gede Ing Rajek di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya. Gede ing Rajek, menurut catatan sejarah adalah salah seorang pimpinan Kerajaan Palembang. Nama lengkapnya adalah Pangeran Mangkurat Seda Ing Rajek, yang memimpin kerajaan ini tahun 1643-1659. Ia dimakamkan di Sakatiga setelah melakukan perlawanan terakhir di daerah pengungsiannya ini.

Selanjutnya Lebung Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Batu, wisata air di Perairan Sungai Ogan terutama di Tanjung Raja dan Indralaya. Juga Pulau Kihaji Desa Indralaya Kecamatan Indralaya, wisata kesenian Dul Muluk asal Kecamatan Pemulutan; kesenian Gitar Tunggal asal Kecamatan Muara Kuang, Rambang Kuang, dan Sungai Pinang, wisata legenda cerita rakyat Parang Betuah, Putri Pinang Masak, Usang Rimau, Usang dan Gombang. Di Lubuk Keliat ada pula cerita legenda yang bercampur sejarah tentang Puyang Kawak.

A. Aspek Fisik dan Sumber Daya Alam

Kabupaten Ogan Ilir memiliki lokasi yang strategis, dimana lokasi Kabupaten Ogan Ilir cukup dekat dengan Kota Palembang yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan.

Kota Inderalaya sebagai ibukota Kabupaten Ogan Ilir juga memiliki lokasi yang strategis karena berlokasi di kawasan metropolitan Palembang, lokasi juga

berdekatan dengan Kabupaten Banyuasin, sehingga dalam hal ini Kota Inderalaya memiliki peranan yang penting baik sebagai pusat pertumbuhan dan pusat distribusi.

Kabupaten Ogan Ilir kaya akan potensi alam antara lain:

- a. Potensi sumber daya pertanian belum dieksplorasi secara maksimal.
- b. Terdapat berbagai sumber daya alam baik galian C (pasir dan tanah liat) dan sumber daya energi berupa minyak.
- c. Terdapat lahan diluar kawasan lindung yang belum dibudidayakan secara optimal baik untuk kegiatan pertanian maupun non pertanian.
- d. Tersedia berbagai sumber air dalam jumlah besar, yaitu air permukaan dan mata air sehingga dapat dimanfaatkan untuk menunjang pengembangan wilayah.
- e. Masih tersedia lahan yang luas yang dapat digunakan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Ogan Ilir dari aspek fisik adalah :

- Adanya lahan rawa yang cukup luas yang memiliki keterbatasan untuk pengembangan pertanian (membutuhkan input yang cukup besar) dan perlu kehati-hatian dalam pengembangannya.
- Perubahan Guna Lahan yang terjadi menyebabkan terjadinya konfil konflik pemanfaatan ruang antara sektor, seperti pengembangan kawasan industri di kawasan yang merupakan resapan air.

B. Aspek Sosial dan Perekonomian

Kabupaten Ogan Ilir didukung oleh antara lain sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan dan penggalian.

 Komoditi utama sektor pertanian adalah sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, terutama padi. Padi dari Ogan Ilir yang cukup terkenal yaitu padi pegagan. Selain padi, Kab. Ogan Ilir juga terkenal dengan buah nenasnya (sentra penanaman nenas miik masarakat sangat popular di Kecamantan Tanjung Batu, Payaraman, Lubuk Keliat, Rambang Kuang dan Muara Kuang. Produksi nenas mencapai 69.187 ton.

- Sub sektor perkebunan terutama adalah kelapa sawit dan karet. Perkebunan kelapa sawit terutama di Kecamatan Muara Kuang, sedangkan perkebunan besar lainnya adalah perkebunan karet dan tebu.
- Sub sektor perikanan juga merupakan tumpuan Kabupaten Ogan Ilir. Produksi perikanan terbesar diperoleh dari hasil ikan tangkap pada perairan rawa/lebak yang biasanya panen menjelang musim kemarau sampai awal musim hujan.

Permasalahan yang ada dari sektor perekonomian adalah belum berkembangnya sektor pariwisata dan perdagangan karena masih minimnya investasi, serta masih kurangnya ketersediaan infrastruktur serta belum adanya program inovasi potensi daerah.

C. Aspek Transportasi, Sarana dan Prasarana

Kabupaten Ogan Ilir berlokasi di persimpangan beberapa ibukota kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga memiliki akses cukup baik. Kabupaten Ogan Ilir berlokasi di jalur lintas timur dan lintas tengah yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dengan provinsi Jambi dan Lampung.

Pelayanan beberapa fasilitas sosial ekonomi seperti fasilitas pendidikan, perekonomian, peribadatan, kesehatan dan pelayanan umum lainnya di Kabupaten Ogan Ilir dinilai relatif cukup memadai. Hampir seluruh wilayah kecamatan telah terlayani oleh fasilitas sosial ekonomi ini. Untuk pelayanan prasarana jaringan listrik dan jaringan telepon, saat ini telah melayani seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir.

Adapun beberapa permasalahan dari aspek transportasi di Kabupaten Ogan Ilir adalah:

- a. Kondisi jalan yang menghubungkan antar desa ada sebagian besar dalam kualitasnya kurang baik sehingga aksesiblitas masih rendah.
- b. Sarana transportasi darat masih terbatas seperti angkutan umum dan terminal yang memadai sebagai moda dan fasilitas antarmoda.

Sedangkan pelayanan jaringan air bersih dinilai masih belum memadai karena saat ini pelayanan air bersih oleh PDAM baru melayani 8 kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan kecamatan lainnya yang belum terlayani PDAM memenuhi kebutuhan air bersihnya dari sumur gali.

4.2. STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG WILAYAH

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang;
- tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional, dan provinsi;
- jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan secara efisien dan efektif;
- harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
- tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel II.1 Matrik Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang di Kabupaten Ogan Ilir

No	KEBIJAKAN	STRATEGI		
1	Peningkatkan keterkaitan ekonomi dan ruang antara Kabupaten Ogan Ilir dengan wilayah luar baik di dalam Provinsi Sumatera Selatan maupun luar wilayah propinsi terutama pada kawasan yang berdekatan dengan Kota Palembang dalam konteks Kawasan Metropolitan Palembang.	 a. Menetapkan hirarki kota dan fungsi pusat-pusat kegiatan yang terintegrasi b. Mengembangkan keterkaitan antar kota secara fungsional dan tata ruang 		
		c. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif		
		d. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan industri ekstraktif (industri hasil pertanian, perikanan dan		

No	KEBIJAKAN	STRATEGI			
		kehutanan) yang produktif dan mendekati bahan baku			
		e. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan pariwisata berbasis lingkungan (eco-tourism)			
		f. Menyerasikan laju perkembangan antar wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan serta memperluas keterkaitan ekonomi dan ruang antar dan intra wilayah.			
2	Peningkatan Aksesibilitas daerah yang relatif tertinggal melalui pengembangan prasarana wilayah	a. Mengembangkan sistem prasarana utama wilayah yang terdiri dari jaringan transportasi darat yang terintergrasi untuk meningkatkan aksessibilitas antar kota-kota sebagai pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya serta antar kota di kabupaten sekitar, serta untuk mendukung pengembangan kawasan produksi.			
		b. Mengembangkan sistem prasarana pengairan untuk menunjang pengembangan usaha pertanian tanaman pangan, terutama persawahan lahan basah.			
		c. Meningkatkan distribusi pelayanan dan daya energi listrik.			
		d.Peningkatan prasarana telekomunikasi untuk menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal.			
		e. Pengembangan fasilitas sosial ekonomi diarahkan pada setiap pusat permukiman untuk mewujudkan sistem pusat-pusat permukiman yang hirarkis.			
3	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dasar secara terpadu dan merata di seluruh wilayah	a. Meningkatkan penyediaan dan kualitas pelayanan prasarana air minum, air limbah, drainase, persampahan dan prasarana perkotaan lainnya sesuai dengan			

No	KEBIJAKAN	STRATEGI		
		kebutuhan dan arah pengembangan wilayah		
		b. Meningkatkan penyediaan dan pelayanan antar moda transportasi untuk pelayanan yang aman, nyaman dan handal dilengkapi jaringan pedestrian, angkutan massal dan ruang terbuka hijau		
		c. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem jaringan prasarana yang ada serta mendorong pengembangan prasarana untuk mendukung pusat- pusat kegiatan baru yang diprioritaskan		
		d. Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan jaringan prasarana pada ruang-ruang yang sudah ditetapkan		
		e. Mengembangkan kerjasama antar daerah dan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyediaan prasaran		
4	Peningkatan upaya pelestarian lingkungan berupa kawasan perlindungan setempat dan rawa konservasi untuk fungsi ekologis dan biologis	a. Menetapkan, memantapkan dan mempertahankan kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, cagar budaya dan kawasan rawan bencana		
		b.Mempertahankan sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air dan rawa konservasi untuk perlindungan setempat		
		c. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau minimal 30 % dari kawasan fungsional perkotaan serta mendorong masyarakat untuk menanam pohon		
		d.Mengendalikan kegiatan-kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan lindung		
5	Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Ogan Ilir dalam pengembangan perekonomian	a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya baik produksi maupun permukiman secara optimal sesuai dengan daya dukung lingkungannya.		

No	KEBIJAKAN STRATEGI			
	Daerah yang produktif dan Berdaya Saing	b.Pengembangan potensi sektor- sektor unggulan (<i>driving force</i>) yang mampu meningkatkan perekonomian wilayah.		
		c. Mempertahankan lahan pertanian tanaman pangan agar tidak terkonversi menjadi peruntukan lain		
		d. Mengembangan kawasan budidaya perikanan dengan sasaran untuk meningkatkan produksi dalam rangka memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan pembinaan sumber daya hayati perikanan.		
		e.Memanfaatkan lahan hutan dan kebun secara optimal dengan menanam jenis produk unggulan serta melibatkan peran aktif masyarakat.		
		f. Mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset, dunia usaha dan pemerintah pusat untuk mewujudkan berdirinya pusat teknologi dan industri (<i>Techno-Industrial Park</i>).		
		g. Pengembangan Inovasi produk unggulan daerah		
		h. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya agar tidak terjadi konflik kepentingan antar sektor melalui penetapan peraturan zonasi, mekanisme perizinan, pemberian intensif dan disintensif, serta pengenaan sanksi.		
6	Pengembangan kawasan strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar wilayah.	a. Memberikan dukungan penataan ruang pada kawasan-kawasan yang mengakomodasikan kepentingan sektor-sektor strategis.		
		b. Meningkatkan kapasitas ekonomi, sosial, budaya dan prasarana fisik pada kawasan yang relatif tertinggal agar terpacu pertumbuhan dan perkembangannya.		

No	KEBIJAKAN	STRATEGI		
		c. Meningkatkan pengembangan pada kawasan potensial berkembang dengan memanfaatkan potensi- potensi yang ada di dalam kawasan, baik aksesibilitas maupun aktor- aktor ekonomi potensial.		
7	Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.	a. mendukung penetapatan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;		
		b.mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusu pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;		
		c.mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara dengan kawasan budi daya terbangun; dan		
		d. menjaga dan memelihara asset-aset pertahanan dan kemanan negara.		

Sumber : Hasil Analisis

BAB V METODOLOGI KERJA

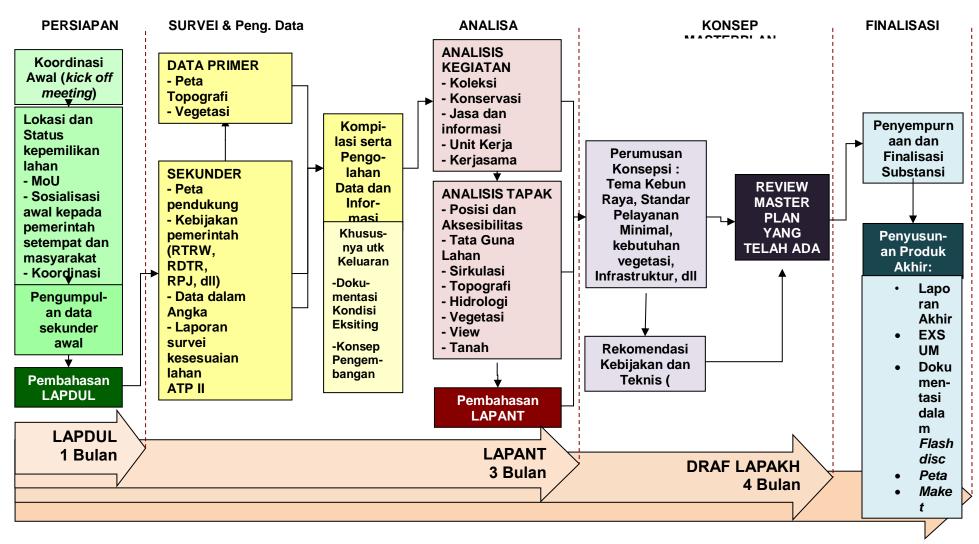
ABSTRAK

METODOLOGI KERJA berisi penjabaran secara teknis mengenai metodologi yang akan digunakan dalam studi ini. Pendekatan studi merupakan hal-hal yang menjadi pertimbangan terkait dengan muatan substansial, seperti sinkronisasi kebijakan, pembangunan berkelanjutan, mitigasi bencana, partisipasi masyarakatdan, lain-lain. Sedangkan metodologi merupakan teknik atau metode yang digunakan dalam penyelesaian studi, yang terdiri dari metodologi kerja, metodologi survei, metodologi analisa.

5.1. METODOLOGI KERJA

Metodologi kerja merupakan skema yang menjelaskan secara sistematis alur dan pola pelaksanaan studi mulai dari tahap persiapan, tahap survei, tahap analisa sampai tahap penyusunan, dilengkapi dengan penjelasan mengenai pentahapan pelaporan sesuai dengan perkembangan pekerjaan dan dimensi waktunya masingmasing.

Secara umum metodologi kerja pelaksanaan **Review Pembangunan Masterplan kebun Raya Sumatera Selatan** dapat dilihat pada skema berikut ini.



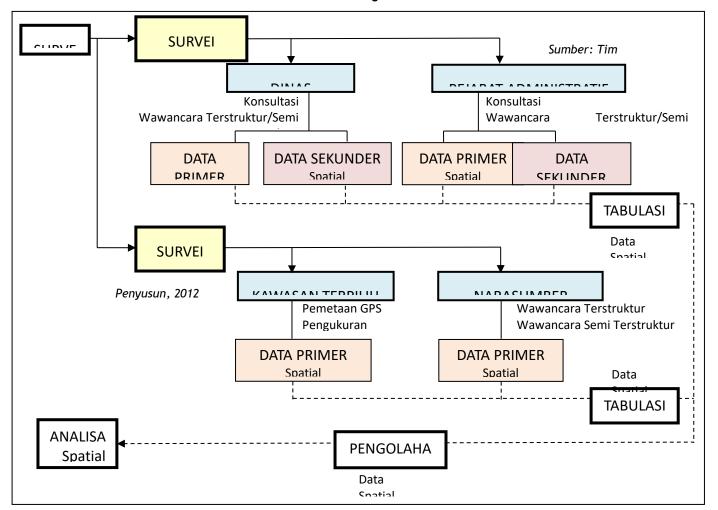
Gambar 5. 1. Metodologi Kerja

5.2. METODOLOGI ANALISA

Analisa Review Pembangunan Masterplan Kebun raya Sumatera Selatan merupakan analisa yang dilakukan untuk mengelaborasi teori, aplikasi dan kebijakan mengenai susbstansi mengenai masterplan kebun raya. Analisa ini akan mengidentifikasi dan menjabarkan berbagai pemahaman yang terkait dengan, pembangunan masterplan kebun raya. Dalam hal ini akan dielaborasi jenis, bentuk dan tipologi setiap aspek berdasarkan referensi yang ada maupun aplikasi di lapangan.

5.3. METODOLOGI SURVEI

Metodologi pelaksanaan survei dalam kegiatan Review Pembangunan Masterplan Kebun raya Sumatera Selatan, dapat dijelaskan dalam skema berikut.



Gambar 5. 2. Metodologi Pelaksanaan Survei

BAB VI PROGRAM KERJA DAN PELAPORAN

ABSTRAK

PROGRAM KERJA DAN PELAPORAN berisi penjabaran sistematika pelaksanaan pekerjaan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Bab ini berisi penjabaran secara teknis mengenai tahapan kerja, skema alur kerja, jadual pelaksanaan kerja, tenaga ahli, organisasi pelaksanaan kerja, serta sistematika pelaporan. Melalui penjabaran tersebut, seluruh rangkaian studi dapat dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan alokasi waktu dan sumber daya yang tersedia.

6.1. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Berdasarkan Lingkup Kegiatan, akan dijabarkan **jadwal pelaksanaan pekerjaan** sesuai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 5 (lima) bulan kalender sebagaimana telah ditetapkan dalam Kerangka acuan Kerja maupun Rapat Penjelasan Dokumen Penawaran. Secara rinci Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Waktu Kegiatan Agustus II III IV I September II III IV Nopember II III IV Keterangan Oktobe Desember II III IV II III IV ı I LAPORAN PENDAHULUAN Persiapan Kompilasi Data Peta Lokasi Peta Existing Penukuran Awal Studi literatur dan Studi Banding Kebijakan dan Peraturan SPM Fisik dan Non Fisik Identifikasi Masalah Presentasi Laporan Pendahuluan

II LAPORAN ANTARA Analisis Site Topografi Fungsi Konservasi Ruang Terbangun Kebudayaan Potensi dan Unggulan Setiap Kebun Raya Alternatif Zoning Peta Topografi Foto Udara Analisis Biaya Kualitatif sesuai Alternatif Usulan tahapan pada masing-masing alternatif Presentasi Laporan Antara LAPORAN DRAFT FINAL Peta Provinsi Peta kawasan Masterplan existing dan Permasalahan Alternatif Zoning Desain masterplan sesuai zoning terpilih Desain masterplan sub zona Prakiraan Biaya kualitatif keseluruhan Usulan Pentahapan Detail desain dan sketsa sub-sub prioritas Pra kiraan biaya sub-sub zona prioritas Desain Guide Line Presentasi Laporan Draft Final LAPORAN FINA

Tabel 6.1. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Sumber: Tim Penyusun, 2011

6.2. STRUKTUR ORGANISASI

Penyusunan struktur organisasi pelaksana dimaksudkan untuk menciptakan sistem koordinasi yang terkendali dan sebagai usaha untuk melaksanakan pekerjaan dengan seoptimal mungkin. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pekerjaan dapat

berlangsung lancar, efisien, terintegrasi, dan selesai secara tepat waktu dengan memberikan keluaran seperti yang diharapkan

Struktur organisasi menyangkut posisi, tugas, wewenang, dan hubungan antar berbagai pihak yang terlibat pada pekerjaan yang merupakan bagian penting pada pekerjaan. Identifikasi instansi yang terkait pada kegiatan Review Pembangunan Masterplan Kebun Raya Sumatera Selatan, dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Pengguna Jasa

Pengguna Jasa merupakan pihak yang merupakan pemberi pekerjaan dan menerima layanan jasa. Pihak pengguna jasa dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Instansi Pengguna Jasa, yaitu SNVT Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PU Lainnya, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum.
- Pejabat Pembuat Komitmen, yaitu wakil dari pihak pengguna jasa yang menanda-tangani kontrak kerjasama dengan penyedia jasa.
 Dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen.
- c. **Tim Teknis**, yaitu wakil dari pihak pengguna jasa yang dibentuk untuk memberikan arahan teknis dan substansial, serta mengendalikan arah pekerjaan.

2. Penyedia Jasa

Penyedia Jasa merupakan pihak yang merupakan penerima pekerjaan dan memberikan layanan jasa. Pihak penyedia jasa dapat dijabarkan sebagai:

- a. **Instansi Penyedia Jasa**, yaitu konsultan berbadan hukum, dalam hal ini PT. Yodya Karya (Persero).
- b. Penerima Komitmen, yaitu wakil dari pihak Penyedia Jasa yang menanda-tangani kontrak kerjasama dengan pengguna jasa. Dalam hal ini Penerima Komitmen adalah Direktur Utama.
- c. Tim Tenaga Ahli, yaitu tim pelaksana dari pihak penyedia jasa yang dibentuk untuk melaksanakan pekerjaan secara teknis dan substansial, sesuai dengan arahan Tim Teknis Pengguna Jasa.

Secara Skematis, organisasi pelaksanaan pekerjaan termasuk hubungan penugasan, tanggung jawab dan koordinasi dapat digambarkan seperti pada diagram di bawah ini:

Kehutanan Konservasi AHLI Utilitas/ME Review Pembangunan Masterplan Kebun Raya Sumatera Selatan KONSULTAN PT. YODYA KARYA (PERSERO) Tenaga Pendukung: Asisten Tenaga Ahli, Tenaga Administrasi dan Operator C*ad* Ahli Perencanaan Wilayah Ahli Lingkungan Direktur Utama **Team Leader** SNVT PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN STRATEGIS BIDANG PU LAINNYA, SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Ahli Lansekap Ahli Geodesi Arsitektur Ahli Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Garis Tanggung Jawab Garis Koordinasi PEMBERI TUGAS Kelembagaan Garis Penugasan **TIM TEKNIS** Ahli struktur

Gambar 6. 1. Struktur Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan Review Pembangunan Masterplan Kebun Rava Sumatera Selat

6.3. TENAGA AHLI DAN TANGGUNG JAWABNYA

Dalam pelaksanaan kegiatan **Review Pembangunan Masterplan Kebun Raya Sumatera Selatan** ini dibutuhkan 9 (sembilan) tenaga ahli dengan dibantu beberapa orang tenaga asisten dan tenaga pendukung yang memiliki kompetensi pada bidangnya yang meliputi:

Tabel 6.2. Jumlah Tenaga Ahli

No.	Posisi / Jabatan	Jumlaha Tenaga	ММ
1	Ketua Tim / Ahli Perencanaan Wilayah & Kota	1	5.0
2	Ahli Arsitektur	1	5.0
3	Ahli Geodesi	1	2.0
4	Ahli Lansekap	1	2.0
5	Ahli Struktur/prasarana,sarana kawasan	1	4.0
6	Ahli Lingkungan	1	3.0
7	Ahli Utilitas	1	3.0
8	Ahli Kehutanan Konservasi	1	2.0
9	Ahli Kelembagaan	1	2.0

Sumber: Tim Penyusun, 2011

Berikut ini disampaikan uraian tugas dan tanggung jawab dari masing - masing tenaga ahli yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) orang Team Leader dengan jumlah 5 OB, yang memiliki latar belakang pendidikan S1 Perencanaan Wilayah dan Kota dengan pengalaman kerja di bidang perencanaan kota sekurang-kurangnya 8 delapan) tahun atau S2 Perencanaan Wilayah dan Kota dengan pengalaman kerja di bidangnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. Adapun peran team leader adalah:
 - a. Sebagai ketua tim dalam Pelaksanaan Kegiatan
 - b. Mampu melakukan Kajian Perencanaan Kota dan analisa sinkronisasi antara RTRW dengan RPJMD, RIPJM serta dokumen pembangunan lainnya di kota dampingan.
 - c. Melakukan sinergisasi dan koordinasi substansi kegiatan.
- 2) satu Orang Tenaga Ahli Arsitektur, Tenaga ahli disyaratkan seorang Sarjana Strata 1 (S1) Jurusan Arsitektur lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan

- tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan berpengalaman pada bidangnya selama 5 tahun, serta memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) sesuai bidang keahliannya, dengan jumlah Orang-Bulan sebesar 5 OB.
- 3) satu Orang Tenaga Ahli Geodesi, Tenaga ahli disyaratkan seorang Sarjana Strata 1 (S1) Jurusan Geodesi/Perpetaan lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan berpengalaman pada bidangnya selama 5 tahun, dengan jumlah Orang-Bulan sebesar 2 OB.
- 4) satu Orang Tenaga Ahli Lansekap, Tenaga ahli disyaratkan seorang Sarjana Strata 1 (S1) Jurusan Lansekap/Pertamanan lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan berpengalaman pada bidangnya selama 5 tahun, dengan jumlah Orang-Bulan sebesar 2 OB.
- 5) satu Orang Tenaga Ahli Struktur/Prasarana dan Sarana Kawasan, Tenaga ahli disyaratkan seorang Sarjana Strata 1 (S1) Jurusan Teknik Sipil lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan berpengalaman pada bidangnya selama 5 tahun, serta memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) sesuai bidang keahliannya, dengan jumlah Orang-Bulan sebesar 4 OB.
- 6) satu Orang Tenaga Ahli Lingkungan, Tenaga ahli disyaratkan seorang Sarjana Strata 1 (S1) Jurusan Penyehatan Lingkungan/Ilmu Lingkungan lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan berpengalaman pada bidangnya selama 5 tahun, dengan jumlah Orang-Bulan sebesar 3 OB.
- 7) satu Orang Tenaga Ahli Utilitas/ME, Tenaga ahli disyaratkan seorang Sarjana Strata 1 (S1) Jurusan Teknik Mesin/Elektro lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan berpengalaman pada bidangnya selama 5 tahun, dengan jumlah Orang-Bulan sebesar 3 OB.
- 8) satu Orang Tenaga Ahli Kehutanan konservasi, Tenaga ahli disyaratkan seorang Sarjana Strata 1 (S1) Jurusan Kehutanan/Konservasi lulusan

universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan berpengalaman pada bidangnya selama 5 tahun, dengan jumlah Orang-Bulan sebesar 2 OB.

8) satu Orang Tenaga Ahli Kelembagaan, Tenaga ahli disyaratkan seorang Sarjana Strata 1 (S1) Jurusan Ilmu Sosial/Kemasyarakatan/Hukum lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan berpengalaman pada bidangnya selama 5 tahun, dengan jumlah Orang-Bulan sebesar 2 OB.

6.4. PELAPORAN

Dalam pelaksanaan penyusunan kegiatan Review Master Plan Pembangunan Kebun Raya Sumatera Selatan terdapat empat tahapan laporan yang dihasilkan, yaitu laporan pendahuluan, laporan antara, draf laporan akhir dan laporan akhir. Keempat laporan ini disusun sesuai dengan perkembangan pekerjaan yang telah dicapai dan jadwal pemasukan seperti yang dijelaskan dalam KAK. Keempat laporan tersebut pada intinya memuat capaian kegiatan berserta informasi yang mendukung lainnya.

Secara umum, sistematika pelaporan yang harus diserahkan konsultan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Laporan Pendahuluan, berisi:

 Laporan ini berisikan metodologi pelaksanaan pekerjaan, hasil studi lapangan dan studi literatur dengan lampiran peta

2. Laporan Antara, berisi:

• Laporan ini berisikan analisa untuk memenuhi usulan pemecahan.

3. **Draf Laporan Akhir**, berisi:

 Laporan ini berisikan desain Master Plan sesuai alternatif zoning yang dipilih.

4. Laporan Akhir, berisi:

 Laporan ini merupakan penyempurnaan dari Laporan Draft, termasuk yang diserahkan bersamaan dengan Laporan Final ini adalah Laporan Penunjang (hasil pengukuran, gambar-gambar dan citra satelit, dll yang belum disebutkan dalam pelaporan di atas).

- 5. *Executive Summary*, berisi ringkasan kegiatan yang merupakan ekstrak dari Laporan Akhir.
- 6. **Dokumentasi** seluruh pelaksanaan kegiatan yang disimpan dalam *flashdisc*.

Waktu dan ketentuan administratif untuk pelaporan Kegiatan Review Pembangunan Masterplan Kebun raya Sumatera Selatan sebagaimana diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yaitu:

- 1. **Laporan Pendahuluan,** harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak SPMK diterbitkan, dibuat sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar, serta dibahas bersama Tim Teknis dan *stakeholder* terkait yang telah ditunjuk oleh pengguna jasa.
- 2. **Laporan Antara,** harus diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak SPMK diterbitkan, dibuat sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar, serta dibahas bersama Tim Teknis dan *stakeholder* terkait yang telah ditunjuk oleh pengguna jasa.
- 3. **Draf Laporan Akhir**, harus diserahkan selambat-lambatnya 4 (enam) bulan sejak SPMK diterbitkan, dibuat sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar, serta dibahas bersama Tim Teknis dan *stakeholder* terkait yang telah ditunjuk oleh pengguna jasa.
- 4. Laporan Akhir, harus diserahkan selambat-lambatnya 5 (tujuh) bulan sejak SPMK diterbitkan, dibuat sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar, serta dibahas bersama Tim Teknis dan stakeholder terkait yang telah ditunjuk oleh pengguna jasa.
- 5. *Eksekutif Summary* harus diserahkan bersama-sama dengan Laporan Akhir, dibuat sebanyak 10 (sepuluh)) eksemplar dengan ukuran A4.
- 6. **Dokumentasi** dalam *flashdisc* harus diserahkan bersama-sama dengan Laporan Akhir, dibuat sebanyak 10 (sepuluh) buah.

BAB VII PROGRAM SURVEI

<u>ABSTRAK</u>

PROGRAM SURVEI berisi rencana pelaksanaan pengumpulan data dan informasi yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya. Bab ini berisi penjabaran mengenai pengertian survei secara umum, bentuk survei, perangkat survei, sasaran data dan informasi, sasaran instansional, alur dan jadwal pelaksananaan survei. Perencanaan survei yang baik akan membuat pelaksanaan survei berjalan lancar, efektif dan efisien.

7.1. PEMAHAMAN UMUM MENGENAI SURVEI

Survei adalah bagian dari rangkaian kegiatan riset yang memusatkan pada salah satu atau beberapa aspek dari obyeknya. Obyek dari survei dapat terdiri dari tokoh masyarakat, dinas, lembaga, badan dan lingkungan fisik. Prinsipnya survei dilakukan untuk mendapatkan data dan fakta mengenai: Kondisi Eksisting, Tren, Potensi dan Permasalahan serta arahan Pengembangan yang telah ditentukan

Berbagai bentuk survei antara lain, yaitu wawancara, diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*/FGD), pengamatan, perekaman, pengukuran, penggambaran, dan penghitungan.

7.2. METODE SURVEI

7.2.1. Kegiatan Survei secara Sekunder

Survei Sekunder merupakan upaya untuk mendapatkan data dan fakta dari dokumen-dokumen yang terkait. Kegiatan Survei secara Sekunder dilakukan dengan melakukan inventarisasi data dan informasi dari berbagai instansi terkait di tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten.

7.2.2. Kegiatan Survei Secara Primer

Survei Primer merupakan upaya untuk mendapatkan data dan fakta secara langsung dari sumbernya. Kegiatan Survei secara Primer dilakukan dengan mendatangi kawasan perencanaan yang telah ditetapkan untuk melakukan:

- Pengamatan dan Perekaman Visual;
- Pengukuran secara Langsung;
- Wawancara dengan Pihak Terkait;
- Pengambilan data GPS (titik koordinat dan tracking).

7.3. PERANGKAT SURVEI

7.3.1. Peralatan (Hardware) Survei

Berbagai kebutuhan peralatan (*hardware*) yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan survei data dan informasi antara lain:

a. Perangkat Acuan

- 1.) Peta Acuan Wilayah
- 2.) Peta Acuan Kawasan
- 3.) Peta Acuan Citra Satelit Eksisting
- b. Perangkat Perekaman
- 1.) Kamera Handycam;
- 2.) Kamera Digital;
- 3.) Recorder Digital.
- c. Perangkat Pengamatan
- 1.) Peralatan Sketsa/Gambar;
- 2.) Paper Holder A4/Folio.
- d. Perangkat Pengukuran
- 1.) Digitizer;
- 2.) Teodolit Total Station;
- 3.) Teodolit Digital;
- 4.) Pita Ukur;
- 5.) Auto Level,
- e. Perangkat Penyimpanan
- 1.) Laptop Computer;
- 2.) Flashdisk.

7.3.2. Checklist Data dan Informasi

Checklist Data dan Informasi merupakan perangkat survei yang digunakan sebagai alat untuk mengontrol perolehan data dan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan studi ini, baik yang diperoleh secara primer maupun secara sekunder. Checklist data dan Informasi lengkap yang dibutuhkan dalam Review Pembangunan Masterplan Kebun raya Sumatera Selatan dapat dilihat pada Lampiran.

7.3.3. Questionnaire untuk Wawancara

Questionnaire merupakan perangkat survei yang digunakan sebagai alat untuk memandu kegiatan wawancara dengan berbagai pihak terkait dalam rangka

memperoleh data dan informasi secara langsung pada sumber-sumber yang telah ditentukan. *Questionnaire* yang dibutuhkan dalam Penyusunan Review Pembangunan Masterplan Kebun raya Sumatera Selatan dapat dilihat pada Lampiran.

7.4. IDENTIFIKASI SASARAN DATA DAN INFORMASI

7.4.1. Data Sekunder

Sasaran data sekunder yang diindikasi terkait dengan kegiatan penyusunan Review Pembangunan Masterplan Kebun raya Sumatera Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.1.
Identifikasi Sasaran Data Sekunder

			Kondisi Saat Ini			
No	Nama Data	Sumber Data	Sudah	Belum	Belum	KETERANGAN
			Didapat	Didapat	Tersedia	
1	Peraturan Perundangan Terkait	Buku, Internet	V			
	Panduan Identifikasi Kawasan					
2	Perkotaan	Buku, Internet	V			
	Pedoman Pelaksanaan Penyusunan					
3	SPPIP	Buku, Internet	V			
	Rencana Program Investasi Jangka					
4	Menengah (RPIJM) Cipta Karya PU	Cipta Karya PU		V		
5	City Development Strategy (CDS)	Cipta Karya PU		V		
6	RPJP dan RPJM Nasional	Buku, Internet	V			
						Perlu
7	Kebijakan Nasional Lainnya	Buku, Internet	V			dilengkapi
						Perlu
8	SNI dan NPSK Terkait	Buku, Internet	V			dilengkapi
9	RPJM Provinsi dan Kabupaten/Kota	BAPPEDA		V		
10	RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota	BAPPEDA		٧		
11	Daerah Dalam Angka (5 tahun)	BPS		٧		
12	Produk Perencanaan Lainnya	BAPPEDA		٧		
13	RENSTRA & RENJA Sektoral	SKPD	_	٧	_	

Sumber: Tim Penyusun, 2011

7.4.2. Data Primer

Sasaran data primer yang diindikasi terkait dengan kegiatan Penyusunan Review Pembangunan Masterplan Kebun raya Sumatera Selatan, dapat dijelaskan sebagai berikut.

 Data dan Fakta mengenai kondisi bangunan dan lingkungan pada wilayah studi

- 2. Data dan Fakta mengenai potensi wilayah studi
- 3. Data dan Fakta terkait keruangan
 - a. delineasi kawasan perencanaan
 - b. pemanfaatan ruang
 - c. daya dukung fisik dan lingkungan
- 4. Data dan Fakta mengenai sektor terkait
 - a. sosial kependudukan
 - b. ekonomi perkotaan
 - c. pariwisata
 - d. daya dukung fisik dan lingkungan
- 5. Data dan Fakta terkait perencanaan makro
 - a. sistem transportasi
 - b. sistem prasarana dan utilitas
 - c. fasilitas umum dan sosial
- 6. Data dan Fakta terkait perencanaan mikro
 - a. beberapa simpul utama
 - b. arsitektur lokal
- 7. Data dan Fakta mengenai kelembagaan

7.5. IDENTIFIKASI SASARAN INSTANSIONAL

Berbagai instansi terkait yang menjadi sasaran kegiatan survei di tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, seperti:

- Tingkat Pusat: Kementerian PU, Kementerian Sosial, Kementerian Perumahan Rakyat, Biro Pusat Statistik (BPS), dan lan-lain;
- Tingkat Provinsi: BAPPEDA, Dinas PU, Dinas Sosial, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Biro Pusat Statistik (BPS), dan lan-lain;
- Tingkat Kabupaten/Kota: BAPPEDA, Dinas PU, Dinas Sosial, Dinas Kebersihan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Biro Pusat Statistik (BPS), PDAM, dan lan-lain.

• Identifikasi sasaran terhadap instansi terkait melalui kebijakan-kebijakan yang yang telah dibuat.